

Tentang Penulis



Ir. Haryani, MT adalah dosen tetap di Universitas Bung Hatta Padang pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Matakuliah yang diampunya adalah khusus pada jenjang S1 yang berkaitan dengan studi perencanaan kota, perencanaan tapak, perancangan kota, perumahan dan permukiman, pariwisata dan metode penulisan ilmiah.

Pendidikan tinggi yang dilaluinya yaitu S1 Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta selesai pada tahun 1999 dan pendidikan S2 Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada selesai pada tahun 1996. Pernah menjabat sebagai Kepala Studio PWK dan Sekretaris Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP Universitas Bung Hatta, Sekretaris Umum MP3I Sumatera Barat dan Anggota Pusat Studi Bencana FTSP Universitas Bung Hatta.

Beberapa penelitian dan karya ilmiah sudah diselesaikan terutama terkait dengan tata ruang kota, penelitian permukiman dan perumahan nelayan, pariwisata bahari dan lain-lain. Pada saat ini masih sering menulis pada harian lokal mengamati seputar pembangunan tata ruang Kota Padang. Pekerjaan-pekerjaan yang masih terkait dengan rencana tata ruang masih dijalani baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai aplikasi teori di lapangan sehingga dapat memperkaya wawasan praktisi.



KAMPUNG WISATA NELAYAN BERBASIS MASYARAKAT



Ir. Haryani, MT



Bung Hatta University Press

Ir. Haryani, MT

KAMPUNG WISATA NELAYAN BERBASIS MASYARAKAT



Bung Hatta University Press

**KAMPUNG WISATA NELAYAN
BERBASIS MASYARAKAT**



BUNG HATTA UNIVERSITY PRESS

Sanksi pelanggaran pasal 44 : Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 hak cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**KAMPUNG WISATA NELAYAN
BERBASIS MASYARAKAT**

HARYANI

**Penerbit
Bung Hatta University Press
2017**

Judul : **KAMPUNG WISATA NELAYAN
BERBASIS MASYARAKAT**
Penulis : **HARYANI**

Sampul: **Haryani**
Perwajahan: Bung Hatta University Press
Diterbitkan oleh Bung Hatta University Press Juli 2017

Alamat Penerbit:
Bung Hatta University Press
Gedung Rektorat Lt. III LPPM-Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia
Telp. (0751) 7051678, Ext. 323, Fax. (0751) 7055475
e-mail: Lppm-bunghatta@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Cetakan pertama: Juli 2017

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan **Misi** utamanya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya.

Mencermati beratnya tantangan Universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal maupun eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan Universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya dengan menguasai bidang ilmunya dengan kualifikasi S2 dan S3. Kita dituntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Saudara **Haryani** yang telah menulis buku teks **KAMPUNG WISATA NELAYAN BERBASIS MASYARAKAT**. Harapan saya buku ini akan tetap eksis sebagai wahana komunikasi bagi

kelompok dosen dalam bidang ilmu *Science and Technology* sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang diampu dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mahasiswa.

Tantangan ke depan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering dihadapi dalam penulisan buku adalah tidak dipunyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan bagi kita bersama terutama para dosen di Universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Juli 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Azwar Ananda, M.A.

PRAKATA



Dengan Mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga buku teks ini pada akhirnya dapat diwujudkan. Buku ini terlahir atas masih kurangnya bacaan mengenai Kampung Wisata. Telaah literatur, penelitian-penelitian yang dilakukan serta pengalaman akademik dan empiris menyebabkan terlahirnya buku Kampung Wisata Nelayan Berbasis Masyarakat ini.

Penulisan buku teks ini diawali dengan pengertian secara umum Pariwisata. Pada bab selanjutnya diuraikan tentang Kampung Wisata, Kampung Wisata Nelayan serta ditutup dengan bab khusus yaitu Pariwisata Berbasis Masyarakat. Adalah kebanggan apabila buku ini dibaca khusus oleh mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), mahasiswa arsitektur, akademisi, praktisi dan secara

umum dapat pula dibaca oleh masyarakat luas dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan seputar kampung wisata.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DRPM dan Universitas Bung Hatta yang mendanai sehingga buku ini dapat diwujudkan. Sekali lagi terimakasih.

Akhirnya penulis berharap adanya kritikan atau saran bagi perbaikan buku ini untuk masa yang akan datang dan semoga buku ini bermanfaat.

Amin

Padang, Juli 2017

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Sambutan Rektor	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
A. PARIWISATA	1
1. Definisi Pariwisata	1
2. Komponen utama pariwisata	4
3. Jenis-Jenis Pariwisata	7
4. Objek Wisata	9
B. KAMPUNG WISATA	11
1. Definisi Tujuan dan Fungsi Kampung Wisata	12
2. Kampung Wisata	17
a. Pola-pola Kampung	17
b. Syarat Kampung Wisata	19
c. Tipe Desa Wisata	30
3. Manfaat Pembangunan Kampung Wisata	32
4. Strategi Pembangunan Kampung Wisata	34
5. Pendekatan Pengembangan Kampung Wisata	37
a. Pendekatan Pasar	37
b. Langkah Pengembangan	41
c. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	42
d. Pendekatan Ekowisata	48
e. Pengembangan Pariwisata berbasis Pemberdayaan masyarakat	50
f. Pendekatan Budaya	60
g. Pendekatan <i>Good Tourism Governance</i>	62
h. Pendekatan Kesesuaian Antara Permintaan dan Penawaran (<i>Demand and Supply</i>)	66

i. Pendekatan Pengembangan Wilayah	68
j. Perencanaan Kampung Wisata	69
k. Jenis Wisatawan	73
C. KAMPUNG WISATA NELAYAN	77
1. Identifikasi Potensi Kampung Wisata Nelayan	77
a. Aktivitas dan Perilaku Sosial-Ekonomi	77
b. Potensi Atraksi Wisata Budaya Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Padang	80
c. Aktivitas Sehari-hari Masyarakat Kampung Nelayan	85
2. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kampung Wisata Nelayan	98
3. Sistem Pengelolaan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat	101
D. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT	107
1. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat	107
2. Faktor-faktor Pariwisata Berbasis Masyarakat	112
a. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	112
b. Faktor Penghambat Partisipasi	113
3. Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat	115
a. Pariwisata berbasis Masyarakat	115
b. Pendekatan pasar untuk pengembangan kampung wisata	124
c. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata	125

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel 1: Syarat Kampung Wisata dan Pengembangannya	28
Tabel 2: Indikator Kampung Nelayan	79
Tabel 3: Karakteristik Nelayan di Pasie Nan Tigo	86

Daftar Gambar

Gambar 1	: Skema Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	46
Gambar 2	: Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata.....	51
Gambar 3	: Diagram <i>Good Tourism Governance Model</i> ...	65
Gambar 4	: Diagram kesesuaian permintaan dan penawaran	67
Gambar 5	: Konsep Pengembangan Wilayah Berdasar pada Penataan Ruang	69

PARIWISATA

1. Definisi Pariwisata

Beberapa pengertian Pariwisata dari berbagai sumber dapat dilihat sebagai berikut.

a. Fennel (2003)

Pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang mencakup wisatawan dan jasa terkait yang disediakan serta dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi dan akomodasi) untuk menyokong kegiatan mereka.

b. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- Wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

c. Pendit (2003)

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta

menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.

d. Cooper (1998)

Pariwisata adalah suatu aktivitas dari yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggal untuk melakukan persinggahan sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah dan namun didasarkan atas kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan suatu *travel experience* dan *hospitality service*.

e. WTO (1999)

- *Tourism – activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes;* Pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya, jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya.

- *Visitor – any person traveling to a place other than that of his/her usual environ-ment for less than 12 consecutive months and whose main purpose of travel is not to work for pay in the place visited;* Pengunjung adalah siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di luar dari lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di daerah tersebut.
- *Tourist – overnight visitor, visitor staying at least one night In a collective or private accommodation in the place visited;* Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum ataupun pribadi.
- *Same day visitor – excursionists,visitor who does not spend the night in a collective or private accommodation in the place visited;* Pengunjung harian adalah ekskursionis, pengunjung yang tidak bermalam di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.

2. Komponen utama pariwisata

WTO menjabarkan unsur-unsur penting dalam kepariwisataan yaitu a) jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan, b) lokasi kegiatan wisata, c) lama tinggal di daerah tujuan wisata, d) fasilitas dan pelayanan yang dimanfaatkan dan disediakan

oleh usaha pariwisata.

Sementara itu Cooper (1998) berpendapat terdapat tiga elemen utama dalam sistem pariwisata.

1) Wisatawan

Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2) Elemen geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut ini.

a. Daerah Asal Wisatawan (DAW)

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika wisatawan melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali

terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

3) Industri pariwisata

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan, penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

3. Jenis-Jenis Pariwisata

Berbagai jenis pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Adapun jenis-jenis pariwisata adalah sebagai berikut. World Tourism Organization (WTO), 2001 jenis pariwisata terdiri dari; *Cultural Tourism* , *Rural Tourism*, *Nature Tourism* (*Ecotourism* , *Adventure Tourism*), *Sun and Beach Tourism*, *Business Travel*, *Fitness – Wellness and Healt Tourism*.

- a. Pariwisata budaya; seperti kunjungan ke candi, masjid agung, museum, dan keraton.
- b. Pariwisata olahraga; seperti mendaki gunung, berenang di pantai, dan mendayung di telaga.
- c. Pariwisata untuk menikmati perjalanan atau pariwisata petualangan; seperti menjelajah rimba, mengarungi samudera, dan napak tilas.
- d. Pariwisata yang hanya untuk tujuan rekreasi; seperti kunjungan ke taman rekreasi dan pantai.
- e. Pariwisata sambil mengadakan pertemuan atau konferensi.
- f. Pariwisata sambil berdagang.
- g. Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan

pendidikan. Satu di antara sedikit wahana Ekowisata (*Ecotourism*) yang ada di Bali. Wahana ini berupa perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat setempat.

- h. Geowisata merupakan pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi dan sejarah kebumian, sehingga diperlukan peningkatan pengayaan wawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam. Contoh objek geowisata adalah gunung berapi, danau, air panas, pantai, sungai, dan lain-lain. Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan gunung api yang memiliki geowisata potensial, selain itu juga memiliki panorama kaldera, danau Segara Anak yang hijau, puncak, kawah, air terjun, mata air panas, goa, sejarah letusan dan aliran lava baru.
- j. Wisata berbasis budaya merupakan salah satu jenis pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini biasanya dibedakan dari wisata alam dan wisata petualangan.

Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat mempunyai daya tarik bagi wisatawan, yaitu:

- a) Bahasa (*language*).

- b) Masyarakat (*traditions*).
- c) Kerajinan tangan (*handicraft*).
- d) Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*).
- e) Musik dan kesenian (*art and music*).
- f) Sejarah suatu tempat (*history of the region*)
- g) Cara Kerja dan Teknolgi (*work and technology*).
- h) Agama (*religion*) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan.
- i) Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*).
- j) Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*).
- k) Sistem pendidikan (*educational system*).
- l) Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*).

4. Objek Wisata

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tujuan wisata disebut objek wisata.

Objek wisata dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut.

- 1) Objek wisata alam, antara lain pemandangan alam pegunungan, cagar alam, danau, pantai, kawah gunung api, sumber air panas, flora, dan fauna.
- 2) Objek wisata rekreasi, antara lain kolam luncur, kolam

renang, waduk, dan taman rekreasi.

- 3) Objek wisata budaya, antara lain benteng kuno, masjid kuno, gereja kuno, museum, keraton, monumen, candi, kesenian daerah, rumah adat, dan upacara adat.

B. KAMPUNG WISATA

Potensi daya tarik wisata baik yang bernuansa alam maupun budaya pada umumnya berada di pedesaan, seiring dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan. Oleh karena itu, berbagai potensi daya tarik wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan sebagai kampung/desa wisata. Wisatawan dalam perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai kebutuhan baik barang maupun jasa. Masyarakat di pedesaan yang telah merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan ke daerahnya, tentu akan berusaha menjaga lingkungan untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya. Karena apabila lingkungan alam dan budayanya rusak, tentu wilayahnya tidak akan lagi diminati oleh wisatawan. Hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Dengan demikian, maka melalui pengembangan kampung/desa wisata, lingkungan alam dan budaya setempat harus terjaga kelestarian dan kualitasnya, serta meningkatkan kualitasnya (Soekarya 2011).

Keberadaan kampung/desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah kunjungan ke desa wisata bertambah lima kali lipat. Mengacu data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini di Indonesia terdapat 987 kampung/desa wisata. Jumlahnya semakin meningkat sejak pertama diselenggarakannya desa wisata pada tahun 2009.

1. Definisi Kampung/Desa Wisata

Kampung/Desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana kampung/desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat keseharian yang mempunyai ciri khas arsitektur dan tata ruang desa, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata (www.wikipedia.org,2017). Sedangkan Nuryanti (1993) berpendapat bahwa kampung/desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditjenpar mendefinisikan kampung/desa wisata sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan,

arsitektur bangunan dan tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya.

Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah kampung/desa wisata.

Kampung wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di kampung/desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Pengembangan desa wisata didasarkan pada pemenuhan kepuasan wisatawan yang tidak hanya didapat dari fasilitas modern pariwisata tetapi juga interaksi dengan lingkungan dan komunitas lokal yang memiliki kekhasan tersendiri.

Kampung wisata berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kampung wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kampung wisata (Soemarno, 2010).

Kampung Wisata merupakan Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Sedangkan Edward dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*, memberikan definisi : *Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.* Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Menurut Wiendu (1993), kampung wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.

Kampung Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

Kampung Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, memwadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan, memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, serta keikut sertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

Kampung Wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat

dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat .

Dapat disimpulkan bahwa kampung wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Tujuan dari pembentukan Kampung Wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi Kampung Wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi Wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata dan sebagai unsur kemitran baik bagi Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di

daerah.

2. Kampung Wisata

a. Pola-pola Kampung/Desa

Kesatuan kampung/desa sebagai bagian dari pemerintahan, masih berlaku hingga sekarang. Kedudukan tersebut dewasa ini, dikukuhkan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Berdasarkan letak geografisnya, desa-desa dapat digolongkan atas :

- 1) Desa pegunungan, yaitu desa yang terletak di pegunungan dan dataran tinggi
- 2) Desa dataran rendah, yaitu desa yang terletak di dataran rendah
- 3) Desa pantai yaitu desa yang terletak di tepi pantai dan di sepanjang pesisir.

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian pokok penduduk desa-desa dibedakan atas:

- 1) Desa pertanian, desa yang kehidupan utama penduduknya dari bidang pertanian dengan mengelola tanah.
- 2) Desa nelayan, desa yang kehidupan utama penduduknya dari hasil penangkapan ikan di laut,

karena itu lokasi desanya pun berada di tepi pantai atau sekitar pantai.

- 3) Desa kerajinan yaitu desa yang kehidupan utama penduduknya dari bidang kerajinan tangan atau industri.

Ditinjau dari sudut pengelompokan bangunannya, desa-desa dapat digolongkan atas tiga macam pola. Ketiga macam pola tersebut adalah:

- 1) Desa linier, yaitu desa yang perumahan penduduknya (kampung-kampungnya) berkelompok memanjang mengikuti alur jalan desa atau jalan raya, aliran sungai, jalur lembah, atau garis pantai.
- 2) Desa radial, yaitu desa yang perumahan penduduknya (kampung-kampungnya) berkelompok pada persimpangan jalan, biasanya perempatan jalan (simpang empat). Setiap jenis dan pola desa mempunyai corak sosial-budaya sendiri yang mandiri, disamping persamaannya sebagai hasil proses sosial dan sejarah. Di dalamnya terdapat beberapa faktor yang ada dan hidup dalam lingkungan desa masing-masing.
- 3) Desa di sekitar alun-alun atau lapangan terbuka yaitu desa yang pemukiman penduduk dan perlengkapan desanya (balai desa, masjid, sekolah) berkelompok di sekeliling alun-alun desa atau lapangan terbuka. Pola

desa ini dipandang sebagai imitasi desa dan miniatur dari pola kota, kabupaten atau kota kecamatan.

Bilamana memperhatikan pola penyebaran desa memungkinkan terbentuknya dua macam pola desa yang lain, yaitu pola desa yang tersebar dan pola desa yang terkonsentrasi.

Pola desa tersebar diidentifikasi sebagai pola dimana kampung-kampungnya tersebar di beberapa lokasi yang dipisahkan oleh jalan, kebun, persawahan, lembah, hutan. Dalam pola desa tersebar, terdapat kampung induk, yang dapat dinyatakan pusat desa (pusat pemerintahan desa) yang ditandai dengan adanya kantor desa, dan kantor lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa seperti LKMD dan LMD.

Pola desa berkonsentrasi lebih berintikan kepada pemusatan kampung-kampung dalam satu lokasi dan berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya pola desa terkonsentrasi luas wilayahnya agak sempit.

b. Syarat Kampung Wisata

Menurut pola, proses, dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka (Wiendu,1993).

1) Tipe Terstruktur

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter sebagai berikut:

- Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Kelebihan tipe ini adalah dalam citra yang ditumbuhkan mampu menembus pasar internasional.
- Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat lokal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan diharapkan terkontrol dan pencemaran sosial budaya akan terdeteksi sejak dini.
- Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir sehingga diharapkan menjadi agen untuk mendapatkan dana internasional sebagai unsur utama menangkap jasa dari hotel-hotel berbintang.

2) Tipe Terbuka

Tipe ini ditandai dengan karakter tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal sehingga sulit dikendalikan.

Kampung wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang

memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Dikawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kampung wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan kampung wisata.

Suatu kawasan dapat menjadi kampung/desa wisata harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Syamsu dalam Prakoso, 2008):

- a) Faktor kelangkaan adalah sifat dari atraksi wisata yang tidak bisa dijumpai atau langka di tempat lain.
- b) Faktor kealamiahannya adalah sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia.
- c) Keunikan, yakni sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding objek wisata lain.
- d) Faktor pemberdayaan masyarakat yang mampu menghimbau agar masyarakat ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan objek wisata di daerahnya.

Tidak semua kampung memiliki peluang menjadi kampung wisata. Pariwisata mensyaratkan beberapa situasi yang membuat sebuah kampung layak didatangi orang untuk berwisata. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki kampung menuju kampung wisata :

- a) Memiliki obyek yang menarik seperti alam pemandangan alam yang indah, tempat yang eksotik, seni budaya yang unik atau budaya masyarakat yang sangat langka. Seperti Desa Panglipuran Bali yang kondang di seluruh dunia karena warganya sangat menjaga tradisi budaya desanya dan juga sangat bersih. Atau sebuah daerah yang memiliki potensi kuliner luar biasa seperti Sate Ambal, sebuah kampung di pinggiran jalur selatan-selatan Kebumen yang kondang karena ada banyak warung sate dengan cita rasa yang khas.
- b) Memiliki jalur transportasi yang mudah dicapai setiap orang menuju ke desa dan obyek itu. Obyek wisata yang gampang dicapai dan kondisi jalan yang baik akan membuat sebuah obyek wisata menjadi pilihan untuk didatangi para wisatawan. Utamanya wisata alam desa yang umumnya berupa pegunungan atau tebing dan sungai, biasanya obyek seperti ini terletak pada area yang sulit ditempuh.

- c) Seluruh warga kampung/desa dan pemerintah desa harus mendukung sepenuhnya kegiatan wisata ini dan tercermin pada sikap mereka ketika menyambut wisawatan yang datang ke desanya. Jangan sampai ada konflik sosial yang membuat wisawatan tidak nyaman selama menikmati kampung wisata. Hal seperti ini seringkali terjadi hanya karena sebuah kampung tak rela kampung sebelah menjadi ramai sehingga berusaha menjatuhkan.
- d) Keamanan dan kenyamanan wisatawan jelas syarat mutlak. Jangan sampai ada rasa terancam atau khawatir soal keamanan. Pastikan mobil atau sepeda motor dan seluruh barang bawaan wisawatan aman ketika kendaraan terparkir dan pastikan tidak ada gangguan sedikitpun mengenai keamanan ketika mereka menginap di *homestay* kampung wisata.
- e) Ketika wisawatan dari luar desa datang mereka butuh berkomunikasi dengan keluarganya, kantornya dan sebagainya maka pastikan ada toko yang menjual pulsa dan kebutuhan akomodasi lainnya seperti rumah makan dan toko yang menjual berbagai kebutuhan perjalanan seperti makanan, minuman termasuk menjual bahan bakar kendaraan.

- f) Beriklim sejuk dan dingin adalah beberapa situasi yang bakal membuat wisawatan betah tinggal berlama-lama di desa kita. Untuk itu ada baiknya seluruh warga desa diajak merubah wajah desa menjadi desa yang bersih, indah dengan tanaman bunga-bunga warna-warni menyejukkan mata dan pepohonan yang rindang dan tanaman yang rimbun.
- g) Jika menyediakan *homestay*, pastikan homestay memiliki kamar mandi dan toilet yang bersih dan tentu saja tidak berbau. Ini sangat penting karena bagian ini yang paling sensitif bagi semua orang. Beberapa *homestay* di Bali menjadi sangat ramai pengunjung karena memiliki toilet dan kamar mandi yang setingkat hotel.

Berbagai syarat di atas adalah detail yang harus dimiliki kampung wisata, hal-hal kecil bisa membuat sebuah tempat wisata ramai dikunjungi orang karena setiap orang yang puas dengan sajian wisata yang mereka datangi bakal memberi rekomendasi pada temannya, keluarganya dan semua orang yang dikenalnya. Sebaliknya, hal-hal kecil yang mengecewakan mereka seperti kamar mandi yang kotor, perlakuan warga lokal yang buruk bakal segera menjadi cerita buruk bagi semua orang.

Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga

dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada disuatu kawasan desa wisata antara lain : sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*homestay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Sebagai suatu kampung/ desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a) Memiliki aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b) Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c) Masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan.
- d) Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja

yang memadai.

- f) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Terdapat tiga komponen utama kampung wisata.

- a) Akomodasi

Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

- b) Atraksi

Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta ruang fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

- c) Keindahan alam, keunikan dan kelangkaan desa wisata itu sendiri.

Kampung wisata saat ini memiliki kecenderungan menggunakan konsep ekowisata, dimana pariwisata yang ditawarkan adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pariwisata pedesaan menjadikan masyarakat lebih menjaga keaslian budaya dan alam di desanya untuk dapat mempertahankan minat wisatawan dalam berwisata di

kampung wisata.

Ada beberapa kriteria desa wisata yaitu :

- Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
- Besaran kampung/desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu kawasan.
- Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
- Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Tabel 1: Syarat Kampung Wisata dan Pengembangannya

No	Sumber Teori	Syarat Kampung Wisata	Komponen Pengembangan
1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunikan, keaslian, sifat khas 2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa 3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung 4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat. b. menguntungkan masyarakat setempat. c. berskala kecil. d. melibatkan masyarakat setempat. e. menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat. 2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. 3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya. 4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pariwisata terintegrasi dengan masyarakatan b. Menawarkan berbagai atraksi khas c. Akomodasi berciri khas desa setempat.

No	Sumber Teori	Syarat Kampung Wisata	Komponen Pengembangan
		5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.	
3	Prasiasa (2011)	1. Partisipasi masyarakat lokal 2. Sistem norma setempat 3. Sistem adat setempat 4. Budaya setempat	a. Sistem adat setempat b. Budaya setempat

Untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di suatu kampung wisata, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan yang berwawasan lingkungan sebagai berikut :

- 1). *Eco-lodge* : Renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun *guest house* berupa, *bamboo house*, *traditional house*, *log house*, dan lain sebagainya.
- 2). *Eco-recreation* : Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (*hiking*), *biking* di desa dan lain sebagainya.
- 3). *Eco-education*: Mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan dan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang bersangkutan.
- 4). *Eco-research* : Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta

meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa tersebut, dan sebbagainya.

- 5). *Eco-energy* : Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk *Eco-lodge*.
- 6). *Eco-development* : Menanam jenis-jenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dll, agar bertambah populasinya.
- 7). *Eco-promotion* : Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan kegiatan desa wisata (Soemarno, 2010).

c. Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata di Indonesia, terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a) Tipe terstruktur (*enclave*)

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut :

- Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional.

- Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.
- Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk “menangkap” servis-servis dari hotel-hotel berbintang lima.

Contoh dari kawasan atau perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Nusa Dua, Bali dan beberapa kawasan wisata di Lombok.

Pendekatan Kawasan pedesaan ini diakui sebagai suatu pendekatan yang tidak saja berhasil secara nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pemerintah Indonesia mengharapkan beberapa tempat di Indonesia yang tepat dapat dirancang dengan konsep yang serupa.

b) Tipe Terbuka (*spontaneus*)

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal.

Distribusi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Prawirotaman, Yogyakarta.

3. Manfaat Pembangunan Kampung Wisata

Masyarakat desa sering kali diidentikkan dengan masyarakat miskin, walaupun memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Senarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menguranginya tingkat kemiskinan yaitu mengembangkan potensi yang ada, salah satunya dengan pengembangan wisata alam maupun wisata budaya yang dimiliki oleh sebuah kampung/desa.

Dalam pengembangan kampung wisata sebagai obyek wisata perlu dipahami sejak awal bila masyarakat setempat bukan sebagai obyek pasif namun justru sebagai subyek aktif. Sebuah lingkungan perdesaan dapat dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek wisata. Sebagai obyek artinya kampung tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh kampung akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungannya.

Pengembangan kampung wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah akan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Selain itu kampung wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu kampung dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya kampungnya. Hal lainnya adalah, kampung wisata dapat membuat suatu desa yang mandiri karena dapat menyediakan alternatif pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pembangunan kampung wisata memiliki manfaat ganda bagi berbagai macam bidang yaitu :

- a. Ekonomi, meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal.
- b. Sosial, membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di kampung/desa.
- c. Politik, dari sisi internasional adalah menjembatani perdamaian antar bangsa didunia dan dari sisi nasional untuk memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi.
- d. Pendidikan, keberadaan kampung wisata dapat memperluas wawasan dan cara berpikir orang-orang kampung, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
- e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),

meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.

- f. Sosial budaya, keberadaan kampung wisata dapat menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali.
- g. Lingkungan, dapat menggugah sadar lingkungan yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang.

4. Strategi Pembangunan Kampung Wisata

Banyak cara untuk mengembangkan sebuah kampung wisata. Peran serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kampung wisata merupakan kunci sukses pembangunan kampung wisata yaitu :

- a. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya di bidang-bidang kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada generasi muda, bagaimana menerima dan melayani wisatawan yang baik. Keikutsertaan penduduk setempat

pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.

b. Kemitraan

Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah dalam bidang-bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

c. Kegiatan pemerintahan di desa

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

d. Promosi

Kampung wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu kampung, desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan tersebut.

e. Festival/pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa

lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

f. Membina organisasi warga

Penduduk kampung biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan kampung wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpecah, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan kampung wisata.

g. Kerjasama dengan universitas (PT)

Universitas-universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan kuliah kerja praktek lapangan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin kerjasama antara kampung wisata dengan universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

5. Pendekatan Pengembangan Kampung Wisata

a. Pendekatan Pasar

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai *energy trigger* yang luar biasa, yang membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspek. Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, Semakin buruknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan ekonomi, beberapa dampak negative yang diakibatkan oleh pariwisata.

Dampak-dampak negatif tersebut di atas disebabkan karena pengembangan pariwisata semata-mata dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan pariwisata dipersepsikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan, terutama oleh bidang usaha swasta dan pemerintah. Sementara itu banyak pakar yang mengadari bahwa pariwisata, meskipun membutuhkan lingkungan yang baik, namun bilamana dalam pengembangannya tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan akan menimbulkan dampak negatif.

Dengan tingginya wisatawan yang berkarakter *Nature Based*,

pada satu sisi sangat positif dan bermanfaat, akan tetapi pada sisi lain terlihat belum adanya pendalaman terhadap fungsi lingkungan atau masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya “*Nature Related Tourism*”. Salah satu faktor terpenting untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara merubah perilaku pengunjung dari sekedar mengetahui menuju kepada suatu pemahaman keterkaitan alur dengan kehidupan manusia, dan pendalaman terhadap sumber daya alam hayati atau ekosistemnya menjadi satu prioritas utama dibandingkan dengan hanya memikirkan luas kawasan atau keindahan kawasan saja.

Pengembangan kampung wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dikenal Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Kampung Wisata dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah kampung/desa menjadi kampung/desa wisata.

Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Kampung Wisata terdiri dari:

a) Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa kampung mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal : penulisan buku-buku tentang kampung yang berkembang, kehidupan kampung,

arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

b) Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.

c) Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh kampung tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua. (UNDP and WTO. 1981. *Tourism Development Plan for Nusa Tenggara, Indonesia*. Madrid: *World Tourism Organization*).

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan pemodelan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pendekatan kualitas lingkungan masyarakat, dasar utama yang senantiasa harus dijaga keutuhannya,

sehingga situasi konflik tidak akan timbul bila langkah-langkah pendekatan dengan segala kearifan untuk memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi.

- Pendekatan perencanaan fisik yang meliputi daya tampung ruang, pemilihan daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat serta peletakan zonasi yang seimbang antara zona inti, zona penyangga, dan zona pelayanan, fisis, tanah, air dan iklim biotis.
- Pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata yang dapat dibangun dalam hubungan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.
- Pendekatan dasar rencana tapak yang berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola disain/arsitektural, tata bangunan, topografi, iklim, desain lanskap.
- Pendekatan struktur geo-klimatologis dan geomorfologis setempat harus mendukung kesuburan dan keindahan seperti karakter, pegunungan/perbukitan yang indah, udara yang sejuk serta kondisi hidrologis yang memungkinkan, budi daya pertanian berkembang.

b. Langkah Pengembangan Kampung Wisata

Adapun kriteria pengembangan Kampung Wisata adalah adanya 4A + C1 yaitu :

- a) Memiliki *Attraction*/atraksi wisata unggulan
- b) Memiliki *Amenities*/Kelembagaan
- c) Memiliki Aksesibilitas/Sarana-Prasarana yang memadai
- d) Memiliki *Ancilliries*/Akomodasi wisata pendukung
- e) Memiliki *Community Involvement*/Keterlibatan Masyarakat

Langkah-langkah pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a) Petakan wilayah dengan mengidentifikasi potensi alam, sosial, budaya yang ada di kampung serta dengan mengatur peruntukan wilayah kampung baik inti maupun pengembangan.
- b) Menata wajah kampung dengan memperbaiki fasilitas umum, pemukiman, tempat ibadah, kuburan serta yang lebih penting membebaskan wilayah dari sampah.
- c) Siapkan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Jaringan
 - Buat aturan main pengelolaan kampung Wisata
 - Bentuk Badan Pengelola

- Rancang program kerja (pendek, menengah dan panjang)
- Kembangkan jaringan dan kerja sama

Ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan kampung Wisata diantaranya :

- Kendalikan kepemilikan lahan dengan kontrol tetap di desa
- Tumbuhkan jiwa bersaing sehat
- Setia pada proses awal pengembangan Kampung Wisata dan jangan beranggapan bahwa Kampung Wisata dapat berjalan secara instan.
- Hendaklah bergerak secara bersama antara dinas dan adat
- Tetap seperti semula dan tidak berubah karena menjadi kampung wisata serta yang terpenting dengan selalu menjaga kelestarian

c. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *village tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah

tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah kampung wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama kampung wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan kampung wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Ramuan penting lainnya dalam upaya pengembangan kampung wisata yang berkelanjutan yaitu pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat. Keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi produk wisata pedesaan. Unsur-unsur keaslian produk wisata yang utama adalah keaslian, keunikan, ciri khas daerah dan kebanggaan daerah diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya secara khusus berkaitan dengan perilaku, integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi milik masyarakat kampung wisata.

Oleh sebab itu, pemodelan kampung wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi

kampung untuk memenuhi tujuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan krisis ekonomi daerah pedesaan. Semakin bertambah parah krisis ekonomi akibat berkurangnya kesempatan kerja, salah satu jalan keluar yang dapat mengatasi krisis tersebut adalah melalui pembangunan industri desa wisata skala kecil, sehingga mampu bersaing dan unggul dalam pembangunan daerah pedesaan dan dalam penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Singkat kata, dengan pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya.

Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan.

Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu, menurut *United Nations Environment Programme on Tourism, sustainable tourism* merupakan pengembangan pariwisata yang mempertemukan antara kebutuhan wisatawan pada saat ini dengan tetap mempertimbangkan, melindungi dan mempertinggi potensi aset untuk masa yang akan datang. Hal ini juga berarti mempertimbangkan potensi masa yang akan datang dalam segala sektor, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dipenuhi, yang didukung oleh sistem integrasi kebudayaan, proses ekologi yang esensial, keragaman biologi dan *life support*.

Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu akan selalu memiliki pengaruh terhadap semua aspek pembangunan pada suatu wilayah, berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*), maupun efek ikutan (*induced effect*). Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program – program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan:

- Layak secara ekonomi (*economically visible*)
- Berwawasan lingkungan (*enviromentaly sustainable*)
- Diterima secara sosial (*socially acceptable*)
- Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*)



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar 1 **Skema Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Prinsip pengembangan kampung wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Potensi kampung wisata tergantung juga kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat kampung wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, kampung tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

- a) Keunikan, keaslian dan sifat khas
- b) Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
- c) Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat

berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung

- d) Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

d. Pendekatan Ekowisata

Rumusan ekowisata (*ecotourism*) sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb:

"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."

(Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi / tercemar dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini).

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata

pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari pada *eco – traveler*.

Sementara itu destinasi yang diminati wisatwan *ecotour* adalah daerah alami. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) sebagai berikut:

- Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan
- Melindungi keanekaragaman hayati
- Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Untuk mengembangkan ekowisata dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya yaitu aspek destinasi dan aspek pasar/*market*. Untuk pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan konsep *product driven*. Meskipun aspek pasar perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Pada hakekatnya ekowisata melestarikan, memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebagai

ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologi wisatawan. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

e. Pengembangan Pariwisata berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Community based tourism merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dari pariwisata yang menyatukan dampak aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dari pariwisata.

Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan *community based tourism (CBT)*. Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni *adventure travel, cultural travel dan ecotourism*.

CBT akan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat

peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal juga digarisbawahi oleh Wearing (2001) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Ilustrasi yang dikemukakan oleh Wearing tersebut menegaskan bahwa



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar 2.

Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata

masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan pariwisata, selain pemerintah dan swasta.

Pendekatan perencanaan pariwisata pada masyarakat ini melalui proses dialog antara wisatawan sebagai *guest* dan masyarakat sebagai *host*, yaitu pengembangan pariwisata memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek dan bukan sekedar obyek. Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal;
- b) Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal;
- c) Berorientasi pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif;
- d) Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Dalam proses perencanaan pemodelan kampung wisata tidak

dapat dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul secara partisipatif sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan serta sentralisasi dan bersifat *bottom up*. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas dua perspektif.

- a) Pelibatan masyarakat, setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap, dan pola pikir serta nilai-nilai pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.
- b) Membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan perencanaan dan program pemodelan kampung wisata dalam kerangka pembangunan kampung secara keseluruhan yang berintikan ; (1) kampung tempat dimana pemerintahan desa menjalankan pemerintahannya, (2) kampung tempat dimana penduduk kampung menjalankan pola kehidupan dan keagamaannya dan berkumpul dalam satu harmonisasi kehidupan yang mencerminkan tata karma masyarakat, (3) kampung tempat dimana masyarakat kampung melakukan kegiatan waktu luang

dan berekreasi bercengkerama di alam kampung yang mereka miliki, (4) kampung dimana masyarakat memiliki sikap, perilaku melindungi, memelihara dan memanfaatkan kepemilikan seni budaya, lingkungan, nilai-nilai tradisi yang dapat mendorong kelestarian promosi kampung itu sendiri.

Partisipasi harus bisa mengubah masyarakat dari hanya obyek menjadi subyek pembangunan dan karenanya harus menguntungkan/menyejahterakan masyarakat. Bilamana kampung wisata dikembangkan, maka kampung wisata harus memiliki manfaat terhadap:

a) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Kampung wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan KOPERASI (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat kampung/desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara :

- (1) Usaha Ekonomi Rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari,
- (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan Koperasi,
- (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan

produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat.

Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut di atas dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

b) Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, sebagai regulator dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah ke pendudukan, perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat, Unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Disamping itu beberapa pendapat menunjukkan adanya berbagai dampak yang

tidak diharapkan, seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antara daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan pemodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa wisata mempunyai beberapa ciri, seperti; desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosial budaya pariwisata.

Pariwisata memberikan berbagai dampak kehidupan, yaitu :

- (1) Dampak terhadap struktur demografi
- (2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
- (3) Dampak terhadap transportasi nilai
- (4) Dampak terhadap gaya hidup tradisional
- (5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- (6) Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

c) Pemberdayaan Lingkungan Kampung wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Budiharsono (2006) mengemukakan dimensi ekonomi antara

lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

Prinsip-prinsip yang dapat ditempuh dalam perencanaan kawasan kampung wisata adalah antara lain:

- (1) kawasan kampung/desa wisata harus berdasarkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pembangunan bernuansa lingkungan memiliki keterkaitan dengan pencegahan kerusakan sumber daya alam sebagai akibat dari satu perkembangan kepariwisataan dan merupakan dampak baik terhadap lingkungan hidup biogeofisik dan sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat. Karena itu kewaspadaan terhadap dampak lingkungan dalam pemodelan kampung wisata yang akan diakibatkan oleh kunjungan wisatawan masal menjadi amat penting guna memelihara kelanjutan kualitas lingkungan hidup/sumber daya alam yang tersedia di pedesaan.

- (2) Kawasan kampung/desa wisata harus sudah mengantisipasi secara terpadu, kemungkinan terjadinya dampak lingkungan hidup/sumber daya alam sejak dini, yang digarap sejak tahap perencanaan, sehingga upaya untuk mencegah dan mengarungi serta mengendalikan dampak lingkungan hidup/sumber daya alam sebagai bagian dari pengembangan desa wisata tidak terpisahkan dan dapat dilaksanakan.
- (3) Studi pra-rencana untuk mendukung kampung/desa wisata dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut, sekaligus akan memberikan masukan yang berharga akan tersedianya potensi kampung wisata.
- (4) Pengembangan kampung/desa wisata lebih diarahkan dan dipacu guna menuju upaya pengembangan ekowisata yang berpola pada upaya pemanfaatan dan menyelamatkan lingkungan biogeofisik dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya serta memelihara sumber daya alam pedesaan, dari perusakan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam pedesaan.
- (5) Dalam rangka pengendalian dampak sosial ekonomi dan budaya, pengembangan kawasan desa wisata harus ditujukan kepada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan upaya

pemerintah (daerah) dan dunia usaha yang relevan.

- (6) Pengembangan kawasan kampung/desa wisata tidak dapat dilepaskan dari desa pusat, pemerintah desa, desa tempat masyarakat desa sebagai tempat hidup mereka dan desa tempat berekreasi masyarakat, hal ini penting untuk mencegah beralihnya aset desa dan kepemilikan lahan masyarakat desa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tersisihkannya masyarakat oleh berkembangnya pendatang.

d) Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pemodelan kelembagaan dan sumber daya manusia pada kampung wisata lebih menekankan kepada hal-hal berikut.

- Investasi pada modal manusia (*human capital*) yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kapasitas organisasi di pedesaan, disamping organisasi pemerintahan desa yang secara bersama-sama memiliki keinginan untuk mengembangkan kampung wisata sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan.
- Memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai.

- Memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab dan hemat
- Menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang dapat merusak produktivitas.

Sedangkan melalui pendidikan lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam bentuk pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Pendidikan pelatihan tidak hanya memberikan keilmuan yang lebih penting adalah kesadaran untuk tumbuhnya sikap menerima, bekerja sama, dan menimbulkan perilaku baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan.

f. Pendekatan Budaya

Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai aset budaya masyarakat, baik berupa tata nilai, adat istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari-hari yang dilakukan berdasar tata

nilai yang dianut dan yang berlaku.

Pengembangan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup obyek wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur – unsur lain yang terkait di dalamnya yang juga tidak dapat diabaikan jika pengembangan tersebut diinginkan keberhasilannya. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata budaya; (1) pengembangan obyek wisata itu sendiri; (2) pengembangan paket wisata budaya; (3) pengembangan pelayanan wisata budaya ; (4) pengembangan promosi wisata budaya tersebut. Keempat hal ini terkait satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan.

Belajar dari Pariwisata Provinsi DIY, pendekatan budaya dalam perencanaan pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui:

- Mengidentifikasi wisata budaya yang potensial dikembangkan berdasarkan kajian budaya dalam bentuk obyek wisata maupun atraksi wisata budaya.
- Pengamatan langsung pada sosial budaya masyarakat tradisional terutama dalam bentuk obyek dan atraksi budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Melakukan wawancara dengan para budayawan – budayawan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

terutama budayawan dari Yogyakarta

g. Pendekatan *Good Tourism Governance*

Istilah *governance* sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik selama 120 tahun. Wacana tentang *governance* dalam pengertian yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk dari tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah atau pengelolaan pemerintah, tata pamong. Setelah berbagai lembaga pembiayaan menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan meraka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia istilah *good governance* telah diterjemahkan ke berbagai istilah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintarao Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ada tiga pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya

baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang beribawa dan memiliki visi yang jelas.

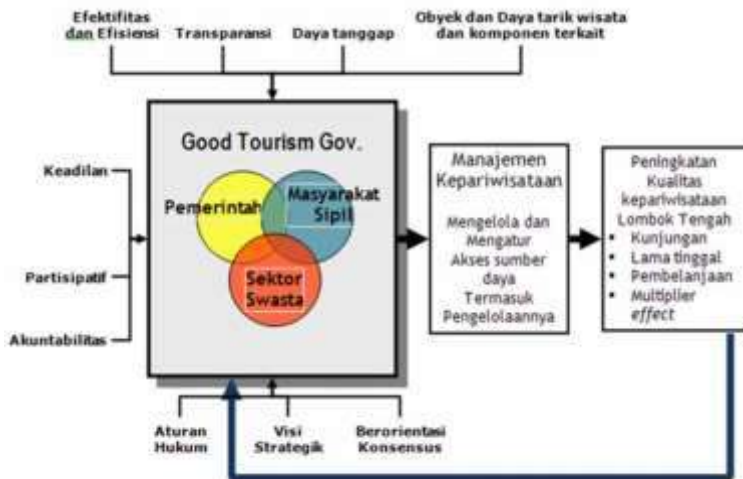
Seperti pernah dikemukakan oleh Mahathir dan Ishihara (1995) yang mengatakan bahwa; Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata sangat memerlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga petaruh (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a) Partisipatif ; Dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.
- b) Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan; Dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan yang ada.
- c) Transparansi; Dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.

- d) Daya tanggap (*responsiveness*); dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
- e) Orientasi pada konsesus; Di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antar warga masyarakat untuk mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
- f) Bersikap adil; Dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
- g) Efektivitas dan efisiensi; Disini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*).
- h) Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; Harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.

- i) Visi strategis: disini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama sama memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Secara diagramatis, visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan bersendikan kepada proses kolaborasi sinergis antara *stakeholders* dalam penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini dapat digambarkan dalam model bagan alir (*flow chart*) berikut ini.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar 3:
Diagram Good Tourism Governance Model

h. Pendekatan Kesesuaian Antara Permintaan dan Penawaran (*Demand and Supply*)

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, maka akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai.

Pendekatan *Demand and Supply* dilakukan melalui pasar wisatawan (domestik dan mancanegara) yang akan menuntut barang/obyek yang baik, yang disertai dengan pelayanan yang baik. Disamping obyek wisata yang menarik, obyek tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memuaskan wisatawan. Wisatawan akan menuntut pelayanan transportasi yang baik, akomodasi yang baik, hiburan yang segar, makanan minuman yang menarik sesuai selera dan pelayanan lainnya. Jika *supply* (obyek wisata) sudah ditingkatkan dan dikemas dengan baik sesuai dengan tuntutan permintaan pasar (wisatawan), maka dapat diperkirakan bahwa arus wisatawan akan meningkat di masa depan.

Aspek-aspek yang akan dikaji dalam tinjauan terhadap komponen penawaran (*supply*), akan mencakup:

- Kualitas dan kuantitas (jenis dan jumlah) atraksi wisata yang telah berkembang dan dikunjungi/ dimanfaatkan wisatawan

- Kualitas dan kuantitas ameniti (akomodasi, restoran, informasi dan fasilitas yang lain) menurut wisatawan
- Kualitas dan kuantitas akses terhadap atraksi wisata (sistem transportasi) menurut wisatawan
- Sistem promosi dan pemasaran yang telah dilakukan, direncanakan dan efektifitasnya terhadap tingkat kunjungan dan motivasi wisatawan
- Jumlah, jenis, dan asal wisatawan (jumlah kunjungan), *length of stay*, pola/ besaran pengeluaran.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar. 4
Diagram kesesuaian permintaan dan penawaran

i. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Tiga konsep utama pengembangan wilayah yang mengacu pada penataan ruang yaitu pusat pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional (*functional integration*) dan pendekatan desentralisasi (*decentralization approach*) merupakan teori yang relevan untuk diterapkan dalam program pengembangan pariwisata. Sebagai sebuah komoditi, pariwisata dimaksudkan menjadi penggerak kegiatan perekonomian wilayah dalam pengertian yang luas, sehingga perlu disediakan secara lengkap fasilitas–fasilitas pelayanan regional untuk memfasilitasinya.

a. Pusat pertumbuhan

Konsep pusat pertumbuhan adalah mengembangkan wilayah sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimilikinya (area strategis, ekonomi, produk, *image* dan sebagainya) serta mengintegrasikan pusat tersebut dalam pengembangan sistem infrastruktur pendukung yang efisien.

b. Integrasi fungsional

Konsep integrasi fungsional adalah merupakan alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi–fungsi yang komplementer.

c. Desentralisasi

Konsep desentralisasi adalah mencegah terjadinya aliran

yang keluar (*outflow*) dari sumber daya manusia (*brain drain*). Melalui konsep ini diharapkan pengelola wilayah (dengan daerah yang lebih kecil) memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan jenis strategi dan kebijakan untuk daerahnya.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar. 5 **Konsep Pengembangan Wilayah** **Berdasar pada Penataan Ruang**

j. Perencanaan Kampung Wisata

Perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Jelasnya perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang dan usaha/cara yang efektif untuk pencapaiannya. Oleh karena itu perencanaan adalah suatu keputusan apa yang diharapkan dalam waktu yang akan datang.

Dalam penyusunan perencanaan kawasan kampung wisata merupakan suatu proses kesinambungan. Sebagai satu proses dalam penyusunan perencanaan kawasan kampung wisata dibutuhkan suatu tindakan pemeliharaan yang terbaik/menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Mengingat perencanaan kawasan kampung wisata lebih banyak melibatkan peran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka bentuk perencanaannya lebih menitik beratkan kepada *Community Based Tourism*. Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dalam mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dengan atau oleh masyarakat kampung yang dikenal sebagai satu pendekatan *Participatory Planning* dapat diartikan sebagai metode yang memungkinkan masyarakat kampung untuk saling berbagi meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan kampung membuat rencana dan bertindak.

Kampung wisata yang bertumpu pada masyarakat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan partisipatif dapat dilakukan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencanaan untuk masyarakat tetapi sebagai

pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam perencanaan/pemodelan kampung wisata, tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri yang berkembang dalam pembangunan desa saat itu. Mengapa masyarakat kota saat ini nampaknya merindukan kehidupan pedesaan, salah satunya adalah rutinitas kota yang mengubah pola hidup mereka menjadi serba sibuk dan membutuhkan nuansa ketenangan. Suasana kampung/pedesaan saat ini menjadi dambaan masyarakat kota untuk melakukan kunjungan.

Namun sejauh mana dan sekuat apa potensi pedesaan menjadi daya tarik wisata, tentunya memerlukan berbagai kajian inovasi dan kreasi yang dapat dibentuk desain arsitektur rumah di pedesaan, lingkungan yang diciptakan dalam lanskap pedesaan, makanan dan agro industri sebagai pelengkapan kenikmatan di luar pedesaan dan seperangkat ide-ide kreatif lainnya yang menunjang terhadap desa wisata.

Dalam membangun dan mengembangkan kampung wisata, dasar utama dan penting yang harus dipahami oleh para pengembang adalah; (1) kampung tempat dimana pemerintah desa dilaksanakan, dengan demikian adanya pembangunan kampung wisata tidak menjadi pesaing atau mempengaruhi sistem pemerintahan kampung yang telah berjalan, (2) kampung tempat dimana masyarakat desa mengolah kehidupan

dan menjalankan kehidupan beragama, dengan demikian setiap bentuk pembangunan sosial ekonomi yang masuk tidak merusak pola ekonomi desa, tetapi menunjang terhadap struktur ekonomi pedesaan, (3) kampung tempat masyarakat memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan bercengkerama dengan alamnya, dengan demikian bagi wisatawan akan mendorong terjelmanya keharmonisan dengan masyarakat setempat.

Adapun struktur perencanaan dan pengembangan kawasan desa wisata diawali secara *bottom up* dengan mengkaji berbagai kekuatan masyarakat kampung baik dari sisi budaya sosial, lingkungan, ekonomi, sumber daya yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Unsur pembangunan tersebut diatas berkembang menjadi potensi kampung yang dapat menjadi bagian integral pembangunan pada tingkat desa dan wilayah kecamatan bahkan bagian integral dari pembangunan Kabupaten atau Kota. Dengan perencanaan dan pengembangan kawasan kampung wisata tidak dapat dipisahkan dari pembangunan wilayah kecamatan maupun pembangunan desa baik dari segi kebijakan strategi maupun program. Oleh karena kampung wisata merupakan salah satu bentuk keterkaitan pembangunan antar sektor yang tercermin pada perencanaan dan pengembangan integrasi dalam bentuk prasarana, sarana dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk tercapainya optimalisasi unsur-unsur tersebut maka

pendekatan zonasi dalam kawasan kampung wisata merupakan sistem yang dapat memadukan kebutuhan fasilitas dan perlindungan atau konservasi. Sedangkan dasar perhitungan standar kebutuhan ruang (pola ruang), terdiri dari kebutuhan ruang luar (tapak, bentangan alam) dan kebutuhan ruangan dalam (bangunan). Rasio perbandingan antara kebutuhan ruang luar (bentangan alam) dan bangunan bervariasi melatarbelakanginya. Sebagai contoh, ada yang menggunakan standar 70 % digunakan untuk lahan terbuka dan 30 % untuk bangunan. Pola orientasi dimaksud adalah untuk memperhitungkan posisi dan kedudukan bangunan-bangunan sebagai elemen-elemen usaha pariwisata terhadap sinar matahari, view ke arah laut, angin, cuaca dan lanskap mengikuti bentuk fisik seperti terdapat pohon pelindung, pohon perdu pembatas, pohon tanaman hias, serta tanaman penutup tanah, disamping itu corak lingkungan lanskap alami seperti bukit-bukit kecil, sungai (selokan) dipertahankan sebagai harmonisasi alam.

k. Jenis Wisatawan

Karena bentuk wisata pedesaan yang khas maka diperlukan suatu segmen pasar tersendiri. Terdapat dua tipe wisatawan yang akan mengunjungi kampung wisata.

a. Wisatawan Domestik

Wisatawan domestik ; terdapat tiga jenis pengunjung domestik yaitu :

- Wisatawan atau pengunjung rutin yang tinggal di daerah dekat kampung tersebut. Motivasi kunjungan : mengunjungi kerabat, wisata kuliner, membeli hasil laut dan hasil bumi, barang-barang kerajinan dan lain-lain. Pada perayaan tertentu (tolak bala) atau hari libur, pengunjung tipe pertama ini akan memadati kampung wisata tersebut.
- Wisatawan dari luar daerah (luar propinsi atau luar kota), yang transit atau lewat dengan motivasi, wisata kuliner khas kampung wisata, membeli hasil kerajinan setempat, wisata alam atau wisata kuliner.
- Wisatawan domestik yang secara khusus mengadakan perjalanan wisata ke daerah tertentu, dengan motivasi mengunjungi daerah pedesaan nuansa pesisir terutama kampung nelayan, kampung penghasil kerajinan secara pribadi dan lain-lain.

b. Wisatawan Manca Negara

- Wisatawan yang suka berpetualang dan berminat khusus pada kehidupan dan kebudayaan di pedesaan. Umumnya wisatawan ini tidak ingin bertemu dengan

wisatawan lainnya dan berusaha mengunjungi kampung dimana tidak begitu banyak wisatawan asing.

- Wisatawan yang pergi dalam grup (di dalam suatu biro perjalanan wisata). Pada umumnya mereka tidak tinggal lama di dalam kampung dan hanya tertarik lingkungan/kampung dan budaya yang masih asli.
- Wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi dan hidup di dalam kampung dengan motivasi merasakan kehidupan di luar komunitas yang biasa dihadapinya.

C. KAMPUNG WISATA NELAYAN

1. Identifikasi Potensi Kampung Wisata Nelayan

a. Aktivitas dan Perilaku Sosial-Ekonomi

Aktivitas dan perilaku komunitas nelayan dapat diidentifikasi dalam perilaku sosial budaya dan ekonomi. Pada perilaku sosial budaya ditunjukkan melalui adanya beberapa karakter khusus yaitu :

- Interaksi untuk berkelompok tinggi dikarenakan selain masa hidup di perahu cukup lama (antara 8 jam sehari, bahkan sampai 30-45 hari) dan tantangan hidup sangat besar maka keterikatan dan ketergantungan dengan komunitas sangat tinggi.
- Konvensi sering terjadi dilingkungan komunitas nelayan, mulai dari tingkat kesepakatan jual-beli ikan, pengguna perahu, keterkaitan dengan jenjang community leadership juga berkaitan dengan kesepakatan daerah-daerah tangkapan. Dengan demikian pengelompokan-pengelompokan yang terjadi dilingkungan nelayan akan sangat kuat karena dilandasi adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut.

- Ikatan kekerabatan yang terbentuk memberikan ciri khas pada penataan pemukiman komunitas nelayan. Kekerabatan yang dibentuk berdasar atas ikatan kedaerahan yaitu dasar asal pemukim, ikatan mata pencaharian yaitu spesifikasi sebagai nelayan, sebagai pengrajin industri kecil perikanan, ikatan keagamaan, dan ikatan kondisi psikologis. Ikatan kekerabatan mengarah pada kecenderungan terjadinya pengelompokan/*eng-clustered* antara unit permukiman dan kebutuhan akan ruang aktivitas.

Sedangkan pada aspek ekonomi, perilaku komunitas nelayan adalah:

- Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan ciri ketradisional yang masih melekat menjadi nelayan sulit untuk masuk dalam pola ekonomi formal. Hal ini yang menjadi semakin terisolasi kawasan nelayan.
- Mata rantai kegiatan ekonomi komunitas, baik dalam bentuk mata pencaharian pokok maupun mata pencaharian sampingan melalui usaha kecil dan industri rumah tangga dan tradisional menciptakan kebutuhan ruang- ruang transisi terhadap pola ruang kawasan.

Implikasi dari perilaku sosial dan ekonomi tersebut akan mengarah pada pembentukan struktur permukiman.

Tabel 2: Indikator Kampung Nelayan

Indikator	Variabel	Alasan Pemilihan Variabel
1. Budaya Kampung Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis atraksi seni khas kampung nelayan •Jenis tradisi unik dan asli khas kampung nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> •Budaya khas kampung nelayan merupakan sajian utama dalam destinasi wisata kampung nelayan sehingga perlu diketahui budaya khususnya
2.Lokasi obyek wisata yang sudah ada disekitar kampung nelayan	<ul style="list-style-type: none"> •Jarak dengan obyek wisata terdekat yang sudah ada •Lingkup daerah pengembangan pariwisata yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> •Obyek wisata yang sudah ada disekitar kampung nelayan dapat menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan
3. Kegiatan sehari-hari masyarakat nelayan yang unik yang berciri khas kampung nelayan	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis kegiatan sehari-hari masyarakat kampung nelayan yang unik dan berciri khas 	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis kegiatan sehari-hari masyarakat diperlukan sebagai daya tarik utama dalam pengembangan desa wisata kampung nelayan
4.Sistem adat kampung nelayan	<ul style="list-style-type: none"> •Sistem adat yang masih berlaku di kehidupan masyarakat kampung nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> •Sistem adat yang masih berlaku, dibutuhkan untuk diketahui terkait dengan penerimaan masyarakat nelayan dengan desa wisata kampung nelayan yang akan dikembangkan
5. Partisipasi masyarakat nelayan	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi masyarakat kampung nelayan •Partisipasi kelompok pariwisata kampung nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> •Keterlibatan masyarakat nelayandan kelompok masyarakat budaya terkait pengembangan desa wisata kampung nelayan merupakan merupakan hal penting.
6. Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana dan prasarana dasar penting

dasar Wisata Kampung Nelayan	prasarana dasar yang mendukung pengembangan desa wisata kampung nelayan	untuk memprediksi kebutuhan wisatawan terkait dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung
7. Ketersediaan fasilitas pendukung wisata kampung nelayan yang berciri khas	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas penginapan yang berciri khas kampung nelayan dan masyarakat nelayan • Ketersediaan toko souvenir yang menjual barang berciri khas kampung nelayan • Ketersediaan fasilitas rumah makan yang berciri khas dan menjual kuliner kampung nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendukung yang berciri khas dan dapat menjadi salah satu daya tarik desa wisata kampung nelayan
8 Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pengelolaan kawasan desa wisata kampung nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola kawasan desa wisata “kampung nelayan” diperlukan agar pengembangan desa wisata dapat berkelanjutan

b. Potensi Atraksi Wisata Budaya Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Padang

a) Ritual Tolak Bala”

Selain potensi penduduk dan alam/lingkungan (pantai, muara, sungai dan bahari), Kampung nelayan Pasie Nan Tigo memiliki potensi atraksi budaya yang sangat menarik yaitu potensi wisata

budaya masyarakat nelayan yang terkenal yaitu “Tolak Bala” (penangkal bahaya).

Masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan merupakan masyarakat asli Minangkabau yang dikenal masih kuat memelihara kebiasaan tradisional yang terwujud dalam adat istiadat sehari-hari. Masyarakat Minangkabau yang terdapat di wilayah pesisir didominasi oleh suku Caniago, Tanjung, Melayu, Koto, Guci, Sikumbang, dan Jambak. Ikatan kekerabatan yang kuat yang ditandai oleh kuatnya rasa kekeluargaan dalam masyarakat, baik dalam kerabat maupun di luar kerabat. Pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan alam (lingkungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari terwujud dalam aktivitas mereka sebagai nelayan.

Salah satu kearifan lokal (budaya lokal) di Sumatera Barat, yaitu ritual paganis dipraktekkan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal, bahkan dijadikan atraksi wisata, misalnya di Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman dan tak terkecuali di Pasié Nan Tigo Kota Padang

Dulunya “tolak bala” dilakukan setiap tahun, namun sayang sejak terjadi gempa besar di Kota Padang pada tahun 2009, ritual “tolak bala” tidak dilakukan lagi.

Di kawasan Pasié Nan Tigo, ritual “tolak bala” dilaksanakan pada siang hari sambil berkeliling kampung dan sepanjang

pantai. “Tolak bala” adalah acara adat yang berisi doa keselamatan agar dijauhkan dari bencana dan marabahaya dan juga untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Tolak bala” tidak sekedar memanjatkan do’a serta puji-pujian kepada yang Maha Kuasa menurut penafsiran mereka, namun dilanjutkan dengan Baureh dan makan bersama. Baureh adalah prosesi memercikkan air yang dilakukan oleh dukun nagari/kampung kepada masyarakat yang hadir. Air dipercikkan dengan menggunakan alat bantu berupa tumbuhan alam yang terdiri dari Sitawa, Cikumpai, Cikarau, Sidingin yang telah dimantra-mantrai dan diasapi bakaran kemenyan.

Bersamaan dengan percikan air, berbagai harapan pun dipanjatkan kepada yang Maha Kuasa, termasuk memohon kesehatan jasmani dan rohani serta dijauhkan dari marabahaya maupun penyakit yang akan mendera. Adakalanya, masyarakat membekali dirinya dengan Sitawa, Cikumpai, Cikarau, Sidingin untuk dimantra-mantrai, kemudian dibawa pulang dan digunakan untuk melakukan prosesi “baureh” di rumah masing-masing. Usai prosesi “baureh”, dilanjutkan dengan makan bersama. Hidangan yang dimakan bersama-sama berasal dari masakan yang dibawa oleh setiap keluarga yang mengikuti ritual.

Ritual “tolak bala” diiringi dengan pemotongan hewan sapi atau kambing. Kepala sapi atau kambing dibawa ketengah laut

kemudian dibuang ketengah laut sebagai sesaji untuk menguasai laut. Sedangkan badannya dibuat masakan/lauk untuk dimakan bersama-sama pada saat prosesi makan bersama pada malam harinya.

Ritual tolak bala dulunya dilakukan oleh masing-masing suku/kampung, baik kampung “Pasio Sabalah”, “Pasio Tangah”, “Pasio Ujung”/ “Pasio Jambak” dimana semua kampung tersebut menjadi Kampung Pasio Nan Tigo (pasar yang terdiri dari 3 kampung) sekarang.

Dalam setahun ritual “tolak bala” setidaknya dilaksanakan dua kali. Pertama, satu atau dua hari menjelang bulan Ramadhan. Kedua, usai Ramadhan. Namun demikian, ritual ini bisa juga dilaksanakan pada saat-saat darurat/bencana dan gagalnya tangkapan nelayan.

Ritual tolak bala’ biasanya dipimpin oleh tetua adat, ninik mamak, aparat kelurahan yang membacakan sejumlah doa. Kemudian dilanjutkan dengan ritual membuang uang logam dan sesajian ke sungai/laut, dengan tujuan agar segala kesusahan dan marabahaya hanyut bersama uang logam dan sesaji tersebut.

Ritual tolak bala’ ini berlanjut dengan menjalankan tradisi Pararakan. Yaitu, mengarak sebuah miniatur mesjid yang ditemplei uang kertas, keliling kampung. Setelah diarak, miniatur masjid tersebut diberikan kepada mesjid yang

membutuhkan bantuan. Usai serah-terima miniatur masjid, para ninik mamak langsung mengadakan acara adat makan bajamba dan dilanjutkan dengan prosesi dzikir bersama hingga pagi hari yang dilakukan hanya oleh kaum lelakinya saja.

b) “Mandarahi Biduk”/”Malimau Kapa”

“Mandarahi biduk” atau “Malimau Kapa”/perahu adalah ritual yang dilakukan ketika perahu/biduk/kapal baru dibeli. Ketika perahu baru di beli, sebelum perahu di bawa ke laut untuk digunakan oleh nelayan , maka dilakukan upayara “mendarahi biduk” yang bertujuan agar kapal membawa berkah dan mendapat hasil yang banyak serta selamat dilindungi oleh Yang Kuasa.

“Mendarahi Biduk” dilakukan dengan memotong seekor ayam yang dilakukan oleh seorang “siak”/ orang alim ulama dan disaksikan oleh pemilik “biduk” sembari membacakan doa-doa dan darahnya di mandikan di dalam “biduk”. “Biduk” disandarkan di tepi pantai terdekat untuk memudahkan proses ”mendarah biduk”.

Pada malam harinya dilaksanakan acara berdoa yang dihadiri oleh anggota “biduk” (ABK) yang berjumlah lebih kurang 10-12 orang, keluarga pemilik “biduk” dan orang “siak”/alim ulama.

“Malimau” kapal memiliki dua versi, yaitu “malimau” kapal

baru yang pertama kali mau turun kelaut, dan jika kapal-kapal nelayan selalu sial dalam setiap operasi (selalu ada halangan atau kesulitan memperoleh hasil tangkapan).

“Malimau” kapal baru prinsipnya merupakan suatu upacara untuk minta izin kepada Allah SWT untuk mengelola isi lautan.

“Malimau kapal” juga bertujuan untuk membuang sial. Upacara “malimau kappa”¹ yang berkaitan dengan membuang sial ini relatif lama dan rangkaian upacara tergantung dari pantangan yang dilanggarnya, tetapi jika nahkoda (sama dengan tungganai untuk kapal tonda atau bagan, sama dengan pawang untuk perahu payang) bersama ABKnya tidak tahu sebab kesialan yang menimpa, biasanya mereka langsung datang ke dukun kapal untuk kapalnya di”limau”i.

c. Aktivitas Sehari-hari Masyarakat Kampung Nelayan

Aktifitas masyarakat kampung nelayan Pasie Nan Tigo dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Aktivitas Nelayan

- **Melaut**

Nelayan Pasie Nan Tigo umumnya adalah kepala keluarga, anak laki-laki yang tidak bersekolah dan atau keluarga nelayan yang sudah turun menurun menjadi nelayan. Aktifitas nelayan

yang utama adalah melaut yaitu aktifitas mencari ikan baik di perairan laut maupun sungai.

Nelayan di Pasié Nan Tigo jika dilihat dari jenis alat tangkapnya terdiri dari 4 katagori nelayan, yaitu: Nelayan “Bagan”, Nelayan “Payang”, Nelayan “Pukek” dan Nelayan “Pancing”

Masing-masing nelayan memiliki karakteristik aktivitas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Karakteristik Nelayan di Pasié Nan Tigo

Jenis Alat Tangkap	Nelayan “Bagan”	Nelayan “Payang”	Nelayan “Pukek”	Nelayan “Pancing”
Fasilitas	Kapal	Biduk/perahu motor	Sampan (non mesin)	-
Kepemilikan	Pribadi	Pribadi	Pribadi	Pribadi
Alat tangkap	Bagan	Payang/jaring panjang	Pukat/jaring pendek	Pancing, jala
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hari - 1 minggu (Menginap di tengah laut) • berangkat jam 15.00 sore 	05.00- 09.00 17.00 – 22.00	07.00- 10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang waktu • Jika air jernih
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 10 jt • Minyak dan makan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 250.000,- • minyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 250.000,- • minyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 25.000 - 30.000 ,- • umpan

Jenis Alat Tangkap	Nelayan “Bagan”	Nelayan “Payang”	Nelayan “Pukek”	Nelayan “Pancing”
Jumlah nelayan	16 – 20 org	± 10 – 12 org	± 10 org	1 org
Bahan jaring	Benang “Nilon”	Benang “Tetoron”	Benang “Tetoron”	Benang “Nilon”
Bentuk jaring	Vertikal	kantong	kantong	-
Jumlah pemilik	51 orang	32 orang	6 orang	320 orang

Sekembali dari melaut hasil tangkapan biasanya dimasukkan kedalam keranjang dan di beli oleh pedagang/pengepul untuk dijual ke pasar Banda Aie Pasie Nan Tigo, pasar-pasar di Kota Padang seperti pasar Tabing, pasar Raya Padang atau keluar daerah. Namun jika nelayan melaut didaerah selatan Pasie Nan Tigo yaitu di daerah Pulau Pisang maka hasil tangkapan biasanya dijual di Pasar Gaung TPI Teluk Bayur atau di Muaro.

Tiap keranjang berisi 30 kg ikan dengan harga yang sudah disepakati antara nelayan dengan pembeli. Umumnya 1 keranjang dihargai Rp.250.000,- s/d Rp. 400.000,-. Namun tak jarang nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan terutama jika haru “buruak” disebabkan cuaca yang buruk.

Namun demikian untuk nelayan pemilik bagan dan anak “bagan” (Anak Buah Kapal) juga mendapat bagian untuk dimakan oleh keluarga. Budaya yang sangat eksotis dan sangat menarik.

Cara pembagian penghasilan nelayan pukek adalah sebagai berikut. Misalnya:

- a. Hasil melaut :Rp. 1.500.000,-
- b. Minyak : Rp. 500.000,-
- c. Sisa : Rp. 1.000.000,-
- d. Dibagi berapa banyak yang ikut melaut, jika ada 10 orang maka masing-masing akan mendapat Rp.100.000,-. Namun rata-rata ‘anak biduk’ mendapat upah Rp.20.000,- s/d Rp. 30.000,-.

Aktifitas nelayan dapat dilaksanakan jika hari baik (cuaca baik) dimulai pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB dan pulang melaut sekitar jam 13.00-14.00 WIB. Namun jika hari buruk (cuaca buruk) maka aktifitas utama nelayan tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk nelayan pancing kegiatan memancing dimulai pada jam 9.00 – 12.00 dan jam 14.00 – 16 00. Ikan yang paling banyak di lokasi memancing yaitu di “banda aie” atau di sungai adalah ikan nila. Hasil memancing akan banyak bila kualitas air tidak keruh dan jernih sedangkan jika keruh maka tidak akan diperoleh hasil.

- **Memperbaiki dan membuat perahu / kapal / perahu / ”biduk”**

Jika tidak melaut para nelayan melakukan berbagai aktivitas antara lain membuat dan atau memperbaiki perahu tradisional, kapal/biduk/ bagan. Umumnya keluarga nelayan melakukan aktivitas tersebut yang tentunya sangat menarik sebagai potensi atraksi aktivitas desa nelayan.

Perahu/kapal/biduk yang rusak biasanya adalah karena rangka perahu (“gading-gading”) yang lapuk (“kayu busuk”) atau badan perahu yang mengalami kebocoran. Perbaikan perahu dilakukan dengan membeli kayu/papan yang berasal dari Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yang merupakan salah satu kawasan pesisir Kota Padang. Harga 1 lembar Kayu/papan dengan ukuran 12 m x 30 cm adalah Rp.300.000,-.

Aktivitas lain para nelayan adalah membuat perahu. Sebanyak 6 orang yang tersebar di 6 RT/RW masih aktif membaut perahu tradisional yang diperlukan bagi nelayan jika perahu yang ada sudah sangat tua, rusak atau memang ada pesanan.

Di Pasie Nan Tigo tidak tersedia tempat pendaratan perahu, namun perahu dan kapal nelayan mendarat di muara sungai dan berlabuh di laut lepas yang tak jauh dari pantai. Sedangkan perahu kecil yang dapat ditarik ke pantai, terdapat disepanjang pantai Pasie Nan Tigo.

Untuk membuat “biduk” (perahu yang besar, mesin dan alat tangkap), biasanya dibeli dari daerah pesisir lainnya yaitu di Air Aji Kabupaten Pesisir Selatan. Harga “biduk” baru dengan ukurang sedang adalah Rp. 26.000.000,- sedangkan “biduk” bekas dihargai Rp. 20.000.000,-. Sedangkan harga biduk ukuran kecil termasuk alat tangkap dan mesin adalah Rp.8.500.000,-.

- **Memperbaiki dan membuat jala**

Aktivitas nelayan lainnya jika tidak melaut adalah memperbaiki dan atau membuat jala/jaring (alat tangkap). Bahan membuat dan memperbaiki jaring/jala adalah dari benang “nilon” atau benang “teton”. Kerusakan yang terjadi pada jaring/jala adalah robek pada beberapa tempat dan diperbaiki dengan menyambung/merajut benang-benang tersebut sehingga lubang tertutup dan jaring kembali seperti semula.

Biaya untuk memperbaiki jala tergantung besarnya lubang pada jala yang berpengaruh pada banyaknya benang yang dibutuhkan. Untuk satu “glondong” benang biasanya dapat digunakan untuk memperbaiki jala dengan luas 90,4 cm x 50/100 cm.

Selain memperbaiki jala yang robek kegiatan para nelayan pasca melaut atau tidak melaut adalah memperbaiki pelampung

jala. Kegiatan memperbaiki jala biasanya dilaksanakan didepan atau disamping rumah yang tidak memerlukan tempat khusus. Jenis jala/”pukek” yang dibuat para nelayan tergantung dengan jenis ikan yang akan ditangkap misalnya ikan “pinang-pinang”, ikan “gambolo” atau ikan “kase”.

- **“Mencolok Pukek” (Mewarnai Jala)**

“Mencolok pikek” (mewarnai jala) adalah aktivita nelayan lainnya ketika tidak melaut. Adapun tujuan “mencolok pukek” adalah agar warna jala (alat tangkap) memiliki warna merah (gelap) sehingga jika jala dipakai untuk menangkap ikan, ikan tidak akan melihat jala. Dengan demikian para nelayan akan lebih banyak mendapat hasil tangkapan.

Adapun aktivitas “mencolok pukek” dilaksanakan sekali sebulan atau jika sudah kelihatan warna jala yang memudar (terang) yang mengakibatkan hasil melaut semakin hari semakin berkurang. Semakin sering jala dipakai maka warna jala akan cepat memudar. Oleh sebab itu kegiatan “mencolok jala” dilaksanakan jika dirasa hasil tangkapan menurun dan warna jala memudar.

Bahan untuk mewarnai jala adalah dengan memakai kulit kayu “uba” sejenis kayu pohon kelapa/enu. Kayu “uba” di tumbuk hingga halus kemudian diperas untuk diambil airnya yang berwarna merah pekat (merah tua). Air perasan kayu “uba”

digunakan untuk merendam jala/pukat selama lebih kurang 1 jam kemudian dijemur hingga kering. Ulang rendaman jala kedalam perasan kayu “uba” hingga tiga kali atau hingga jaring/jala menjadi berubah warna menjadi merah tua.

Biaya yang dibutuhkan untuk “mencolok pukek” diantaranya adalah untuk membeli bahan kayu “uba” pertujuh ikat adalah Rp.150.000,-. Upah menumbuk kayu “uba” Rp.10.000,-/ikat sehingga untuk tujuh ikat dibutuhkan upah menumbuk Rp. 70.000,-. Setiap “mencolok pukek” rata-rata dikerjakan oleh 6 orang dengan upah masing-masing Rp. 50.000,- sehingga upah yang dibutuhkan Rp. 300.000,-. Total biaya yang dibutuhkan setiap “mencolok pukek” untuk membeli bahan, upah menumbuk kayu “uba” dan “mencolok pukek” adalah Rp.520.000.000,-.

- **Mengecat dan Mendisain Badan Perahu**

Kegiatan lainnya para nelayan di Pasie Nan Tigo adalah mengecat disain badan “biduk”/perahu. “Biduk”/perahu nelayan biasanya dicat dengan disain tertentu yang memiliki unsur keindahan dan diberi nama pemilik bagan. “Biduk” yang baru dibeli dan sebelum digunakan, akan didisain oleh ahlinya dengan upah Rp. 300.000,- sedangkan bahan cat dibutuhkan biaya Rp. 700.000,-.

Jika cat perahu sudah dirasa kabur dimakan usia, maka dilakukan mengecatan ulang tanpa mengganti disain. Pengecatan dilakukan oleh pemilik “biduk” atau keluarga nelayan.

- **Membuat kemudi “biduk” (“daun biduk”)**

Kemudi “biduk” atau yang sering disebut dengan “daun biduk” adalah alat yang dipakai oleh “biduk” atau perahu yang berfungsi sebagai kemudi untuk mengarahkan “biduk” untuk sampai kepada lokasi yang dituju. Kemudi “biduk” terbuat dari sebilah kayu yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai papan tetapi memiliki ketebalan yang diperkirakan kuat untuk menjadi baling-baling perahu.

Kayu yang semulanya berbentuk bulat kemudian di tempa/dibentuk dengan cara memahat bagian demi bagian kayu sehingga membentuk sebuah baling-baling perahu. Baling-baling perahu hanya bertahan beberapa bulan saja tergantung jenis kayu atau kualitas kayu yang dipakai.

Pembuatan kemudi “biduk” dilakukan oleh para nelayan atau orang yang memang pandai membuat kemudi dengan upah seadanya. Biasanya pembuatan kemudi “biduk” diupah berupa “samba” (sambal/lauk) jika “biduk” sudah beroperasi.

- **“Memanjek Karambia” (Memanjat Pohon Kelapa)**

“Memanjek karambia” atau memanjat pohon kelapa adalah aktivitas lain para nelayan jika tidak melaut. Memanjat pohon kelapa yang tumbuh subur disepanjang pantai Pasie Nan Tigo bertujuan untuk memetik buah kelapa baik yang sudah tua maupun yang masih muda.

Memetik kelapa di Pasie Nan Tigo memiliki keunikan tersendiri yaitu kelapa dipetik bukan oleh manusia tetapi dipetik oleh seekor “baruak”/kera. “Baruak atau kera yang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga bias membedakan mana kelapa yang tua atau kelapa yang muda. Kelapa yang dipetik oleh “kera adalah kelapa yang sudah tua saja sedangkan kelapa yang muda tidak boleh dipetik oleh kera karena akan pecah jika sampai ketanah. Kelapa yang muda hanya dipetik langsung oleh nelayan tidak menggunakan kera.

“Memanjek karambia” dilakukan oleh kerja yang sudah terlatih. Kera yang sudah berumur 3 tahun dan dilatih oleh pemilik, pada lehernya diikatkan seutas tali yang panjangnya disesuaikan dengan tinggi pohon kelapa yang akan dipetik. Pada ujung tali dipegang oleh pemilik kera sedangkan ujung satunya lagi yang terikat pada leher kera, kemudian pemilik akan menggerak-gerakkan tali untuk memerintahkan kera memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa yang sudah tua.

Setelah sampai diatas pohon kelapa kera akan dengan sangat mahir memilih buah kelapa yang sudah tua dan menjatuhkannya. Setelah tidak ada lagi yang tua maka pemilik kera aka menggoyang-goyangkan tali bertanda kera harus turun.

Biasanya pemilik kera bisa jadi nelayan tapi ada pula yang bukan nelayan tetapi orang disekitar kampung nelayan. Adapun upah bagi pemilik kera adalah per-10 buah kelapa yang dipetik diambil 2 buah sebagai upah pemilik kera.

Aktivitas “mamanjek karambia” di Pasie Nan Tigo ini sangatpotensial dan unik karenanya akan dapat menjadi daya tarik wisata jika suatu saat Pasie Nan Tigo ini dikembangkan menjadi destinasi wisata kampung nelayan di Kota Padang.

2) Aktivitas Keluarga Nelayan (Istri dan Anak)

a) Mengolah Kuliner

Tidak dapat dipungkiri Propinsi Sumatera Barat sangat terkenal dengan wisata kuliner selain wisata budaya dan wisata alam yang tersebar diseluruh pelosok negeri. Kelurahan Pasie Nan Tigo yang merupakan salah satu kelurahan pesisir di Kota Padang yang merupakan kampung nelayan, selain memiliki potensi wisata pantai juga memiliki potensi wisata kuliner. Hal ini didukung oleh berbagai kuliner atau makanan yang memiliki ciri khas kampung nelayan.

Adapun aktivitas masyarakat nelayan Pasie Nan Tigo yang sangat menarik adalah aktivitas kuliner yang memiliki ciri khas.

- **Palai Bada (Pepes ikan teri) dan Palai Pucuk Parancih (Palai pucuk/daun ubi)**

“Palai bada” dan “palai pucuk parancih” adalah jenis makan yang menjadi lauk makan nasi. Dengan “bada”/ikan teri atau daun pucuk ubi yang dibumbui berbagai rempah kemudian dibungkus daun pisang, dipanggang dibawah bara api dimana bara api berasal dari sabut kelapa kering. Aroma “palai bada” dan “palai pucuk parancih” sangat wangi sehingga sangat menggugah selera. “Bada” atau ikan teri yang diolah menjadi “palai” merupakan hasil laut tangkapan para nelayan sehingga sangat segar dan menghasilkan makanan yang menggugah selera.

“Palai bada” tidak saja di jual ke daerah sekitar Kelurahan Pasie Na Tigo yaitu ke Lubuk Minturun, Pasar Usang, Anak Air , Lubuk Buayo, Belimbing Kota Padang bahkan sampai diluar yaitu Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Modal dalam memproduksi 1000 bungkus setiap harinya lebih kurang Rp. 2000.000,- yang terdiri dari untuk membeli bahan dan upah. Rata-rata 1 keranjang ikan teri dibeli dengan harga 1 – 1.1 juta rupiah, upah membersihkan ikan teri Rp. 60.000.000,- , daun pisang Rp. 150.000,-, upah memanggng “palai bada”

Rp.15.000,- - Rp.20.000,-, dan bumbu (kelapa parut, cabai dll) lebih kurang Rp. 650.000,-.

- **Rakik Maco (Rempeyek ikan “maco”)**

Makanan “rakik maco” adalah sejenis rempeyek ikan. Biasanya rempeyek di atasnya diberi kacang tanah, sedangkan “rakik maco” di atasnya diberi taburan ikan ‘maco’ dengan bumbu cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta irisan daun kunyit. Sangat gurih menemani makan nasi atau sebagai cemilan.

- **Olahan Makanan “Lauak Pukek dan Lauak Karang”**

Sebanyak 7 warung makan yang menyajikan makanan khas pesisir tersebar disepanjang pantai Pasie Nan Tigo. Warung makan yang menyajikan makanan “lauak pukek” /ikan jaring dan “lauak karang”/ikan karang” merupakan makanan yang diolah oleh masyarakat nelayan yang merupakan aktivitas ibu-ibu rumah tangga nelayan. Ikan-ikan yang diolah adalah hasil tangkapan nelayan dengan memakai alat pancing dan jaring yang diperoleh dari pinggir pantai (laut dangkal) sehingga ikannya memiliki rasa yang manis dan enak berbeda dengan ikan hasil tangkapan di laut dalam. Selain itu ikan-ikan tersebut relatif masih sangat segar karena begitu ditangkap langsung dimasak dan tidak memerlukan waktu lama baru diolah yang menyebabkan rasa ikannya manis dan gurih khas ikan karang.

b) Pengolahan Ikan Tradisional

Sebagai wilayah pantai, Pasie Nan Tigo merupakan salah satu kampung nelayan yang cukup potensial sebagai obyek wisata kampung nelayan dimana kehidupan sangat dominan adalah kehidupan nelayan dengan berbagai macam aktifitasnya. Selain terdapat 1.768 kk nelayan, terdapat juga 13 RT yang mengolah ikan tradisional yaitu di RW III dan RW VIII. Pengolahan ikan tradisional biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dimana hasil tangkapan nelayan dioleh menjadi ikan teri atau ikan kering yang diolah sangat sederhana yaitu direbus dan dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari

2. Identifikasi Sarana Prasarana dan Akomodasi Kampung Wisata Nelayan

a. Ruang Aktivitas Ekonomi

Beberapa fasilitas yang ada di kampung nelayan pada umumnya adalah sebagai berikut:

- TPI (Tempat pelelangan Ikan)
- Poskamladu (Pos Keamanan Laut Terpadu)
- Area Penjemuran Ikan
- Dermaga
- MCK
- TPI (Tempat pendaratan Ikan)
- SPBN

- Pengolahan ikan tradisional
- Cool storage
- Pasar pagi
- Tempat perbaikan perahu
- Tempat pembuatan perahu

Kampung nelayan yang nantinya akan dikembangkan sebagai wisata kampung nelayan haruslah memiliki fasilitas pendukung yang memiliki ciri khas yang unik untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo terdiri dari warung, kios, ruko, rumah makan, depot air minum, jasa penginapan, jasa keterampilan yang terdiri dari tukang kayu dan tukang jahit. Selain fasilitas perekonomian terdapat pasar yang berskala lingkungan yang terletak di Gang Gambolo RT 5 RW IV. Selain itu terdapat fasilitas kenelayanan masing-masing 1 unit yaitu SPBN, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tradisional, pasar tradisional, tempat penambatan kapal dan perbaikan kapal. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjung perekonomian masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo khususnya yang bermatapencarian sebagai Nelayan.

Ketersediaan fasilitas perikanan di Pasie Nan Tigo menjadi daya tarik tersendiri bagi obyek wisata kampung nelayan. Ketersediaan fasilitas kenelayanan merupakan modal penting bagi desa wisata kampung nelayan

b. Fasilitas Rumah Makan

Fasilitas pendukung yang sangat menonjol di kampung nelayan yang mempunyai ciri khas di Pasie Nan Tigo adalah rumah makan “Lauak Karang”/ ikan karang, makanan khas “palai bada”/ pepes ikan dan “rakik maco”/ peyek ikan. Ketiga jenis makanan tersebut hanya ada di Pasie Nan Tigo yang merupakan fasilitas pendukung wisata kampung nelayan yang berciri khas. Dapat juga di jadikan oleh-oleh khas kampung nelayan Pasie Nan Tigo.

Perkembangan kegiatan ini tentunya tidak luput dari banyaknya sumber hasil laut yang tidak saja dijual tetapi juga ada yang diolah oleh sebagian masyarakat. Pengolahan hasil laut oleh keluarga nelayan dapat menambah penghasilan/pendapatan keluarga selain sebagai nelayan.

Hasil penelitian diketahui bahwa aktifitas rumah makan “lauak karang” dibuka pada jam 11.00 – 14.00 saja. Pengunjung berasal tidak saja dari Kota Padang, tetapi luar daerah bahkan dari wisatawan mancanegara.

c. Rumah Nelayan sebagai Fasilitas Penginapan

Di Kelurahan Pasie Nan Tigo tersedia 2 buah penginapan kelas melati. Namun untuk fasilitas penginapan di obyek wisata kampung nelayan sebetulnya dapat memanfaatkan rumah penduduk sebagai penginapan. Hal ini akan sangat mendukung

perekonomian masyarakat, selain itu juga sebagai alternatif usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ditemukan masih ada rumah dalam kondisi tidak layak huni. Sebanyak 181 unit rumah dari 1.379 unit rumah ditemukan tidak layak huni yaitu dapat dilihat dari kondisi fisik rumah yang rapuh bahkan masih ditemukan rumah dengan lantai tanah. Jumlah rumah yang tidak layak huni memang lebih kecil dibanding rumah layak huni, namun demikian kondisi ini membuktikan bahwa masih cukup banyak ditemukan rumah dalam kondisi buruk yang disebabkan perekonomian masyarakat pesisir yang parah.

3. Sistem Pengelolaan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat

Adat secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan hidup sehari-hari yang sifatnya mengikat orang perorang dan masyarakat untuk tunduk dan mematuhi. Adat Minangkabau mempunyai daya lentur yang luar biasa. Meski demikian perlu diketahui bila daya lentur adat itu tidak sama. Hal ini sesuai dengan klasifikasi adat Minangkabau yang terbagi dalam empat tingkat, yaitu (a) adat nan sabana adat, (b) adat yang diadatkan, (c) adat yang teradat, dan (d) adat-istiadat.

Dari deretan ini dapat disimak bila daya lentur yang paling tinggi adalah “adat-istiadat” yang berada di tingkat bawah.

Yang dimaksud adat-istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu "nagari"/kampung yang mengikuti pasang naik dan surut situasi di masyarakat.

Sumatera Barat pada umumnya dan Minangkabau khususnya (termasuk Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang), dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, hal ini dapat dilihat dari falsafah hidup yang telah menjadi cita-cita, dan pedoman dalam kehidupan masyarakat yaitu nilai falsafah hidup "***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***", yang artinya adalah adat berlandaskan syariat, syariat berlandaskan kitab Alquran.

Nilai positif dari aspek sosial budaya yang merupakan kultur dari masyarakat Kota Padang yang juga dimiliki oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya adalah nilai kebersamaan, demokratis dan gotong-royong. *Barek samo dipikua, ringan samo dijinjang, saciok bak ayam, sadantiang bak besi, duduak samo randah, tagak samo tinggi, duduak saurang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* yang artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seciap seperti ayam, sedenting seperti besi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang.

Nilai tersebut di atas diharapkan akan dapat diaktualisasikan dengan baik dalam sistem pemerintahan "nagari" yang tengah

dikembangkan saat ini di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Nilai positif ini harus terus ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat Kota Padang agar kota mampu tumbuh dan berkembang dengan daya dukung segenap lapisan masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang ini, dimana daerah sangat dituntut untuk mampu menggali segala potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki untuk dapat menggerakkan roda pembangunan dan mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Salah satu ciri masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal. Sistem sosial atas kehidupan kekerabatan yang menganut sistem garis keturunan ibu ini menjadikan garis keturunan dan harga benda-benda diperhitungkan melalui garis ibu bukan garis bapak, sehingga yang berkuasa atas seluruh kelompok keluarga adalah saudara laki-laki seorang wanita dan bukan suaminya. Dalam sistem kekerabatan ini terdapat tiga unsur yang paling dominan, yaitu (a) garis keturunan menurut garis ibu, (b) perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang saat ini dikenal istilah eksogami matrilineal, dan (c) ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga.

Aspek sosial budaya lainnya yang penting di bumi Minangkabau adalah adanya kepala-kepala suku yang diangkat

menjadi penghulu atau kepala kaum atau kepala suku¹. Kepala suku disebut penghulu suku dan berkuasa sepenuhnya secara adat terhadap kaumnya dan segala urusan sukunya tidak dapat dicampuri oleh orang atau kaum di luar sukunya. Sebagai masyarakat yang menganut paham kekeluargaan (*familiisme*), orang Minangkabau dilingkupi oleh lembaga-lembaga yang dijiwai oleh sistem tersebut dalam mengatur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya. *Mamak* merupakan lembaga pertama dalam masyarakat Minangkabau yang mengatur kehidupan komunal atau keluarganya. Mamak adalah laki-laki yang dituakan di dalam rumah gadang atau keluarganya. Mamak diangkat dari garis keturunan ibu. Mamak berfungsi sebagai pemimpin rapat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah di rumah gadangnya mengenai segala masalah yang berkaitan dengan keluarga atau komunalnya. Lembaga berikutnya adalah *penghulu*². Penghulu adalah orang yang dituakan di dalam kampung atau sukunya berdasar teritorial geneologis. Penghulu adalah orang yang disegani, dihormati oleh masyarakatnya. Setelah penghulu lembaga berikutnya akan berujung kepada kerapatan adat setingkat nagari. Penghulu memiliki fungsi yang sama dengan mamak, yaitu sebagai pimpinan tunggal, tapi dalam mengambil suatu

keputusan selalu melalui musyawarah dengan membangun institusi rapat dalam kehidupan keluarga, suku dan rapat adat nagari untuk struktur ke dalam *nagarinya*. Untuk struktur ke dalam *nagarinya*, penghulu akan mewakili *nagarinya* dalam kerapatan adat nagari. Sistem pemerintahan Minangkabau adalah *Nagari*.

Nagari merupakan suatu wilayah utama bagi hubungan komunitas masyarakat Minangkabau. Sebuah nagari tidak saja merupakan wilayah teritorial semata namun juga kesatuan adat³, ekonomi bahkan politik. Nagari begitu penting peran dan fungsinya sebab ia merupakan basis kultural dan simbol pemersatu kebudayaan Minangkabau. Naim (1990:48) menyebutkan bila nagari adalah lambang mikrokosmik dari tatanan makrokosmik yang lebih luas. Di dalamnya ada sistem yang memenuhi persyaratan embrional dari sebuah negara. Ikatan bernagari di Minangkabau dahulunya bukan saja primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kekerabatan adat), sifatnya tetapi juga struktural fungsional

D. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

1. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata di Indonesia saat ini semakin berkembang. Beberapa hasil survei menyatakan bahwa industri pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar ekonomi Negara yang cukup besar. Namun, hal tersebut tidak membuat masyarakat sekitar tempat wisata menikmati banyak manfaat dari berkembangnya aspek wisata di daerahnya. Pariwisata di Indonesia saat ini dikuasai oleh investor-investor yang memiliki modal besar untuk membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang di beberapa tempat wisata. Berkembangnya tempat-tempat wisata di Indonesia saat ini, nyaris hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal besar.

Masyarakat sekitar tempat wisata tidak jarang hanya dapat melihat kemajuan daerahnya dalam aspek pariwisata tanpa dapat merasakan manfaatnya. Permasalahan seperti ini terjadi karena masyarakat sekitarnya belum mampu memanfaatkan

potensi masyarakat dan juga wilayah sekitarnya.

Bentuk pengelolaan kampung wisata pada dasarnya adalah milik masyarakat yang dikelola secara baik, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan seperti; (1) aspek sumber daya manusia, (2) aspek keuangan, (3) aspek material, (4) aspek pengelolaan dan (4) aspek pasar. Dalam satu wadah organisasi masyarakat yang berbentuk kemitraan, manajemen korporasi, yayasan atau badan pengelola desa wisata yang unsur-unsur pengelolaannya direkrut dari kemampuan masyarakat setempat dan lebih mendahulukan peranan para pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan.

Pengelolaan kampung wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan wilayah desanya yang dijadikan sebagai kampung wisata. Menurut Cohen dan Uphoff (1979) peran atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan atau pemanfaatan, pengawasan, menikmati hasil dan evaluasi. Selain itu aspek akan syarat-syarat tumbuhnya partisipasi dalam masyarakat juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan seperti adanya kesempatan, kemampuan dan kemauan (Slamet 2003).

Pariwisata berbasis komunitas /*Community Based Tourism*

(CBT) adalah pariwisata yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya kedalam satu kemasan. Hal ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang cara hidup masyarakat lokal. Masyarakat secara bersama-sama membangun dan mengelola pariwisata dengan menggali potensi yang mereka miliki dan juga potensi yang dimiliki kampung atau wilayahnya. Pariwisata berbasis komunitas adalah sebuah konsep yang menekankan masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan objek wisata oleh mereka sendiri.

Beberapa pengertian pariwisata berbasis komunitas menurut beberapa ahli.

a. Garrod (2001)

1) Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada *communitas* yang kurang beruntung di pedesaan.

b. Hausler

CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Hausler menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata.

c. Suansri (2003)

CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Community Based Tourism merupakan sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di wilayahnya. CBT adalah sebuah konsep pariwisata yang dimana pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan

menggunakan konsep pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sangat ditekankan dalam konsep CBT, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan pilar utama agar masyarakat mampu mandiri dan mampu mengelola potensi pariwisata di wilayahnya secara bersama-sama. Konsep CBT juga mengacu pada kearifan lokal setiap wilayah, dimana desa-desa wisata yang dibangun dengan menerapkan konsep CBT menawarkan pariwisata yang memang sudah menjadi budaya wilayah itu sendiri. Keberadaan kampung wisata juga mampu mengangkat budaya lokal setiap wilayah di Indonesia. Sehingga, wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengetahui setiap budaya yang ada di wilayah pariwisata yang menjadi tujuannya. Hal tersebut dapat mengangkat keberagaman budaya Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan budaya.

Sebuah kampung wisata yang dibangun dengan konsep *community based tourism* menjadi sebuah langkah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya untuk dapat mengelola pariwisatanya sendiri dan menjadikan kampung mereka sebagai kampung mandiri. Pembangunan kampung wisata tersebut sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki pariwisata tersebut secara bersama-sama, dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan kampung

wisata di wilayahnya sendiri.

2. Faktor-faktor Pariwisata Berbasis Masyarakat

a. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Pemerintah Malaysia telah mengakui industri pariwisata di Malaysia sebagai mesin untuk ekonomi, sosial, politik dan pembangunan ekologi, terutama di daerah pedesaan. Program *homestay* secara aktif dipromosikan oleh Departemen Pariwisata sebagai jenis wisata berbasis masyarakat di Malaysia. Disadari oleh pemerintah sebagai katalis untuk pedesaan dalam pengembangan masyarakat, khususnya dari perspektif sosial-ekonomi.

Mengembangkan kemampuan masyarakat lokal merupakan komponen penting dalam memastikan apakah proyek pengembangan pariwisata menguntungkan bagi masyarakat. Jika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara aktif dalam berpartisipasi, pihak ketiga bisa dengan mudah memanipulasi mereka, sehingga akan adanya dominasi eksternal pada pengembangan pembangunan pariwisata.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program *homestay*:

- 1) Faktor Internal (faktor jenis kelamin, umur, pendapatan, dan motivasi)

Faktor motivasional yang merupakan faktor internal memegang peranan penting dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat yaitu terkait dengan peningkatan pendapatan yang bisa diraih oleh pihak-pihak yang ikut serta secara aktif, namun disisi lain terkait dengan kapasitas masyarakat dalam menyediakan homestay juga perlu diperhatikan karena kedepannya secara langsung mereka harus mengetahui standarisasi dan perencanaan pengelolaan homestay yang dikelola

- 2) Kesiapan operator homestay, aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan antara masyarakat lokal, (tentang pengetahuan mereka tentang perencanaan dan operasi program homestay, keterampilan yang mereka peroleh untuk menjalankan program dan juga sikap mereka terhadap program)
- 3) Hasil kelayakan pelatihan diperoleh dari komunitas local (kesesuaian program pelatihan dan efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas operator homestay)

b. Faktor Penghambat Partisipasi

Partisipasi lokal sangat penting untuk keberhasilan industri pariwisata karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu produk pariwisata dan masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata harus menjadi titik fokus (Choi & Sirikaya 2005). Sebagian besar keterbatasan ini terjadi di negara berkembang

Dalam mengorganisir fakta yang berkaitan dengan hambatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata di negara berkembang, (Tosun 2000) factor penyebab utama adalah: (i) keterbatasan operasional, (ii) keterbatasan struktural dan, (iii) keterbatasan budaya.

Keterbatasan operasional meliputi sentralisasi publik Administrasi pariwisata, kurangnya koordinasi dan kurangnya informasi. Untuk keterbatasan struktural, diantaranya sikap profesional, kurangnya keahlian, dominasi elit, kurangnya sistem hukum yang tepat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan biaya yang relatif tinggi dan kurangnya sumber daya keuangan. Terakhir, keterbatasan budaya mencakup wilayah terbatasnya kapasitas masyarakat miskin, apatis, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat.

Hambatan budaya adalah rintangan tertinggi yang membatasi partisipasi masyarakat. Temuan baru menunjukkan bahwa cuaca penghalang lain yang menghambat partisipasi masyarakat lokal karena mereka dipisahkan di beberapa desa dan sebagian besar bergantung pada transportasi air. Temuan menunjukkan bahwa budaya merupakan faktor internal, sementara operasional dan struktural adalah hambatan eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat.

Hambatan internal terkait dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh masyarakat setempat sementara hambatan

eksternal berada di luar yurisdiksi mereka. Dalam rangka mendorong partisipasi lokal, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata perlu bekerja sama. Untuk faktor internal yaitu hambatan budaya, masyarakat setempat harus memiliki semangat untuk mengubah sikap mereka dan melihat pariwisata sebagai sesuatu yang memotivasi mereka. Selain itu, masyarakat setempat juga harus mengatasi keterbatasan kapasitas bagi mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat setempat perlu menyadari hak-hak mereka untuk menyuarakan pendapat terkait lingkungan hidup mereka karena mereka adalah salah satu yang akan terkena dampak pembangunan pariwisata. Untuk faktor eksternal yaitu hambatan operasional dan struktural, pemangku kepentingan lain lokal, sektor swasta, serta LSM perlu mengubah persepsi mereka dan menciptakan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilakukan untuk mengembangkan pulau dengan cara yang berkelanjutan yang dapat memuaskan setiap pihak yang terlibat.

3. Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Komunitas

a. Pariwisata berbasis Masyarakat

Wujud dari konsep *community based tourism* adalah dikembangkannya kampung-kampung wisata, dimana dalam kampung wisata, masyarakat yang berada di wilayah pariwisata

mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusianya (masyarakat setempat). Keberadaan kampung wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah kunjungan ke desa wisata bertambah lima kali lipat. Mengacu data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini di Indonesia terdapat 987 desa wisata. Jumlahnya semakin meningkat sejak pertama diselenggarakannya desa wisata pada tahun 2009.

Hudson (Timothy, 1999) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan Murphy (1985) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata. Menurut Murphy setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Pengembangan kampung wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung wisata mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan menggunakan pedoman hidup masyarakat yang dianut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengembangan kampung wisata banyak sekali tantangan yang muncul dari pihak atas, yaitu pihak pemerintah dalam melibatkan masyarakat terkait pengelolaan kampung wisata di wilayahnya.

Kerangka pengelolaan kampung wisata berbasis masyarakat yang melibatkan seluruh pihak, dari pemerintah, swasta, masyarakat lokal, selanjutnya membentuk badan pengelola dan berbagai kelompok sub-divisinya dengan berbagai peraturan adat dan agama yang dianut oleh masyarakat kampung wisata dalam pelaksanaannya.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku

kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan kampung wisata.

Kampung wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan kampung wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan kampung wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan kampung wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Kampung wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di kampung-kampung terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan kampung wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Komponen terpenting dalam kampung wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit- unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta lokasi desa

yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik .

Kaitannya dengan konsep pengembangan kampung wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan kampung wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan kampung wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan kampung wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan kampung wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling terkait. Keberhasilan pengembangan kampung wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan kampung wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku

kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kampung wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan kampung wisata (Nasikun, 1997).

Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam

pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan kampung wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan kepemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi

persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya.

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, aspek partisipasi merupakan isu mendasar. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian kampung wisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi kampung wisata yang berkualitas.

a) Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Parameter yang digunakan untuk menentukan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.

b) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi

Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel dan pengelola atraksi wisata.

c) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan

Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal.

Berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat

mengganggu keamanan kampung dan pengawasan parkir kendaraan yang tidak teratur dan sering menimbulkan kemacetan, pengawasan yang bersifat lebih kompleks seperti pelanggaran tata ruang.

b. Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Kampung Wisata

a) Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan misalnya, penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, dan sebagainya

b) Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk *one way trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya.

c) Interaksi langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat.

c. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

- a) Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut.
- b) Mengkonservasi keseluruhan kampung dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk kampung tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata.
- c) Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi didalam wilayah kampung wisata tersebut yang dioperasikan oleh penduduk kampung sebagai industri skala kecil.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasid Abdul Razzaq, dkk, 2011, *Local Community Participation in Homestay Program Development in Malaysia*, Journal of Modern Accounting and Auditing.
- Asy'ari, Imam Sapari, 1993, *Sosiologi Kota dan Desa Surabaya*, Usaha Nasional.
- Bengen, G.D.2002, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut serta PrinsipPengelolaannya*, IPB, Bogor.
- Chasan Ascholani, 2010, *Kabar Indonesia : Membangun Desa Wisata sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan*.
- Dahuri, R.2001, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002, *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep. 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Menteri Kelautan dan Perikanan*.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman Nelayan*, PLP-KIP Nelayan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Jakarta.
- Dinas Pariwisata DIY, 2014, *Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY*, Yogyakarta.
- Dusseldorp, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*.

- Haryani, Ir, MTP,2007, *Kajian Konsep Permukiman Nelayan Berbasis Bencana di Kota Padang*, Jurnal Universitas Riau, Riau.
- Haryani, Ir,MTP,2009, *Kajian Syarat Atraksi Wisata Bahari Berdasarkan Karakteristik Ekologis Pesisir dan laut*, The Internasional Conference Industry, UTM-Univ. Bung Hatta.
- Haryani, Ir,MTP,2009, *Kajian Konsep Permukiman Nelayan Berbasis Bencana di Wilayah Pesisir Kota Padang*, The Internasional Conference Industry, UTM-Univ. Bung Hatta, 2009
- Isnaini. 2007. *Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di kota Yogyakarta*. Jurnal penelitian BAPEDA Kota Yogyakarta.
- Koswara, Agus. 2011. *Materi Tentang Konsep Desa Wisata. Kabupaten Garut*.
- Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali*, Jurnal Kawistara.
- Nor Azah Mustapha, Inoormaziah Azman, Yahaya Ibrahim ,2013, *Barriers To Community Participation In Tourism Development In Island Destination; Tioman Island*, Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts.
- PP No. 69 Tahun 1996 tentang *Peran Serta Masyarakat*
- Permendagri No. 9 Tahun 1998 tentang *Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang di Daerah*
- Robbins,Stephen P. 1979. *Organizational Behavior; Concepts, Controversies and Applications*.

- Sadyohutomo, Mulyono, 2008, *Managemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sutiyono. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Suharto, Edi., 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.
- Soemarno, MS, 2010, *Desa Wisata*, pslp ppsub-2010.
- S Pedit, Nyoman, 2002., *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tonny, Fredian. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Institut Pertanian Bogor.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- Yoeti A Ok., 2008, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*

